

Pengawasan Masyarakat Sipil atas Sektor Keamanan dan Gender

Karen Barnes dan Peter Albrecht



Pengawasan Masyarakat Sipil atas Sektor Keamanan dan Gender

Karen Barnes dan Peter Albrecht



Geneva Centre for the
Democratic Control of
Armed Forces (DCAF)

Tentang Para Penulis

Karen Barnes dan Peter Albrecht dari *International Alert* (Kewaspadaan Internasional).

International Alert (Kewaspadaan Internasional) adalah sebuah LSM yang berpusat di London yang telah bekerja selama lebih dari 20 tahun untuk meletakkan dasar-dasar bagi perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan di negara-negara yang terkena dampak konflik yang melibatkan kekerasan. Pendekatan multi-aspek *International Alert* berfokus pada dan antar berbagai kawasan, yang bertujuan membentuk kebijakan dan praktik yang mempengaruhi pembangunan perdamaian dan membantu membangun keterampilan dan kemampuan melalui pelatihan.

Program regional *International Alert* (Kewaspadaan Internasional) dilaksanakan di kawasan Danau Besar Afrika, Afrika Barat, Kaukasus Selatan, Nepal, Sri Lanka, Filipina dan Kolombia. Proyek tematik *International Alert* berjalan di tingkat lokal, regional dan internasional, yang berfokus pada isu-isu lintas-sektoral yang sangat penting dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan. Proyek ini meliputi proyek bisnis dan ekonomi, gender, tata pemerintahan, bantuan, keamanan dan keadilan.

Para Penyunting

Megan Bastick dan Kristin Valasek, DCAF

Ucapan terima kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak berikut atas komentar mereka yang sangat berharga terhadap rancangan tool (alat) ini: Sharon Bhagwan-Rolls, Marina Caparini, Sam Cook, Leymah Gbowee, Giji Gya, Franck Kamunga, Nick Killick, Minna Lyytikäinen, Elisabeth Porter dan UN-INSTRAW. Selain itu, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Benjamin Buckland, Anthony Drummond dan Mugiho Takeshita atas bantuan penyuntingan mereka, dan Anja Ebnöther atas bimbingannya dalam proyek ini.

Toolkit Gender dan RSK

Tool (alat) mengenai Pengawasan Masyarakat Sipil atas Sektor Keamanan dan Gender ini merupakan bagian dari *Toolkit Gender dan RSK*. Dirancang untuk memberikan pengantar praktis isu gender bagi para praktisi dan pembuat kebijakan reformasi sektor keamanan, Toolkit ini terdiri dari 12 Tools (Alat) berikut dan Catatan Praktiknya):

- | | |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Reformasi Sektor Keamanan dan Gender | 9. Pengawasan Masyarakat Sipil terhadap Sektor Keamanan dan Gender |
| 2. Reformasi Kepolisian dan Gender | 10. Perusahaan-perusahaan Militer dan Keamanan Swasta dan Gender |
| 3. Reformasi Pertahanan dan Gender | 11. Penilaian, Pemantauan dan Evaluasi RSK dan Gender |
| 4. Reformasi Peradilan dan Gender | 12. Pelatihan Gender untuk Personil Sektor Keamanan |
| 5. Reformasi Hukum Pidana dan Gender | Lampiran Undang-undang dan Instrumen Internasional dan Regional |
| 6. Manajemen Perbatasan dan Gender | |
| 7. Pengawasan Parlementer terhadap Sektor Keamanan dan Gender | |
| 8. Pembuatan Kebijakan Keamanan Negara dan Gender | |

DCAF, OSCE/ODIHR dan UN-INSTRAW mengucapkan terima kasih atas bantuan Departemen Luar Negeri Norwegia dalam pembuatan Toolkit ini.

DCAF

Pusat Kendali Demokratis atas Angkatan Bersenjata Jenewa (DCAF, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces) mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi sektor keamanan. Pusat ini melakukan penelitian mengenai praktik yang baik, mendorong pengembangan norma-norma yang sesuai di tingkat nasional dan internasional, membuat rekomendasi kebijakan dan mengadakan program konsultasi dan bantuan di negara yang membutuhkan. Para mitra DCAF meliputi pemerintah, parlemen, masyarakat sipil, organisasi internasional dan para aktor sektor keamanan seperti polisi, lembaga peradilan, badan intelijen, badan keamanan perbatasan, dan militer.

OSCE/ODIHR

Kantor Lembaga Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (ODIHR, Office for Democratic Institutions and Human Rights) adalah lembaga utama untuk dimensi manusiawi keamanan Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE, Organisation for Security and Cooperation in Europe); suatu konsep umum yang mencakup perlindungan HAM; pengembangan masyarakat yang demokratis, dengan penekanan pada pemilihan umum, pembangunan lembaga, dan tata kelola pemerintahan; penguatan pemerintahan berdasarkan hukum; dan mempromosikan rasa saling hormat yang tulus dan saling pengertian antar individu, dan juga negara. ODIHR ikut berperan dalam penyusunan Toolkit ini.

UN-INSTRAW

Institut Penelitian dan Latihan Kemajuan Wanita Internasional PBB (UN-INSTRAW, United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Women) adalah satu-satunya lembaga PBB yang diberi tugas untuk menyusun program penelitian yang berperan bagi pemberdayaan wanita dan pencapaian kesetaraan gender di seluruh dunia. Melalui pembangunan aliansi dengan Negara-negara Anggota PBB, organisasi-organisasi internasional, akademisi, masyarakat sipil dan para aktor lainnya, UN-INSTRAW:

- Melakukan penelitian berorientasi aksi dari perspektif gender yang memberikan dampak nyata terhadap berbagai kebijakan, program dan proyek;
- Menciptakan sinergi untuk manajemen pengetahuan dan pertukaran informasi;
- Memperkuat kemampuan para pemangku kepentingan utama dalam memadukan perspektif gender ke dalam berbagai kebijakan, program dan proyek.

Gambar sampul © Keystone, EPA, Kim Luderbrook, 2003.

© DCAF, OSCE/ODIHR, UN-INSTRAW, 2008. Hak cipta dilindungi undang-undang.
ISBN 978-92-9222-074-7

Dokumen ini diterbitkan secara asli oleh DCAF, OSCE/ODIHR dan UN-INSTRAW pada tahun 2008 sebagai bagian dari Toolkit Gender dan RSK. Versi bahasa Indonesia ini diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh Catherine Muir dan diterbitkan oleh IDSPS atas nama DCAF.

Kutip sebagai: Karen Barnes dan Peter Albrecht, "Civil Society Oversight of the Security Sector and Gender." ("Pengawasan Masyarakat Sipil atas Sektor Keamanan dan Gender.") Gender and Security Sector Reform Toolkit. (Toolkit Gender dan Reformasi Sektor Keamanan.) Penyunting Megan Bastick dan Kristin Valasek. Jenewa: DCAF, OSCE/ODIHR, UN-INSTRAW, 2008.

Printed by SRO-Kundig.

DAFTAR ISI

Daftar Akronim	iii
1. Pendahuluan	1
2. Apa peran masyarakat sipil dalam pengawasan sektor keamanan?	1
2.1 Apa itu masyarakat sipil?	1
2.2 Bagaimana melibatkan masyarakat sipil dalam pengawasan sektor keamanan?	2
2.3 Apa tantangan terhadap keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan sektor keamanan?	3
3. Mengapa gender penting dalam pengawasan masyarakat sipil?	3
3.1 Penguatan pemilik lokal	4
3.2 Mekanisme pengawasan yang efektif dan menyeluruh melalui pemaduan isu gender	4
3.3 Peningkatan pengawasan melalui keterlibatan organisasi wanita	5
4. Bagaimana memadukan gender ke dalam pengawasan masyarakat sipil atas sektor keamanan?	6
4.1 Badan pemantau sektor keamanan	6
4.2 Penelitian dan pengumpulan data	8
4.3 Audit gender	9
4.4 Analisis anggaran gender	9
4.5 Advokasi dan peningkatan kesadaran	10
4.6 Kerja sama dengan media	13
4.7 Pelatihan gender personel sektor keamanan	14
4.8 Organisasi wanita	15
4.9 Jaringan masyarakat sipil	17
4.10 OMS yang tanggap terhadap gender	18
5. Memadukan gender dalam pengawasan masyarakat sipil dalam konteks khusus	19
5.1 Negara-negara pasca-konflik	19
5.2 Negara-negara dalam masa transisi dan negara-negara berkembang	20
5.3 Negara-negara maju	22
6. Rekomendasi pokok	23
7. Sumber daya tambahan	24

SINGKATAN DAN AKRONIM

APG	Kelompok Mitra Parlemen [Inggris] (<i>Associate Parliamentary Group [UK]</i>)
EP	Parlemen Eropa (<i>European Parliament</i>)
EU	Uni Eropa (<i>European Union</i>)
GAPS	Aksi Gender untuk Perdamaian dan Keamanan (<i>Gender Action for Peace and Security</i>)
GBV	Kekerasan Berbasis Gender (<i>Gender-Based Violence</i>)
IMS	Infeksi Menular Seksual (<i>STI, Sexually Transmitted Infections</i>)
NAP	Rencana Aksi Nasional (<i>National Action Plan</i>)
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat (<i>NGOs, Non-Governmental Organisations</i>)
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil (<i>Civil Society Organisations</i>)
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa (<i>UN, United Nations</i>)
SEA	Eksplorasi dan Penganiayaan Seksual (<i>Sexual Exploitation and Abuse</i>)
RSK	Reformasi Sektor Keamanan (<i>SSR, Security Sector Reform</i>)
WIPNET	Jaringan Wanita dalam Pembangunan Perdamaian (<i>Women in Peacebuilding Network</i>)
WOZA	Wanita Zimbabwe Bangkit (<i>Women of Zimbabwe Arise</i>)
WRC	Kampanye Pita Putih (<i>White Ribbon Campaign</i>)
UN SCR 1325	Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 mengenai wanita, perdamaian dan keamanan (<i>United Nations Security Council Resolution 1325 on women, peace and security</i>)

Pengawasan Masyarakat Sipil atas Sektor Keamanan dan Gender

1 Pendahuluan

Tool (alat) ini memberikan pengantar mengenai pentingnya dan manfaat dari pemaduan isu gender ke dalam pengawasan masyarakat sipil atas sektor keamanan, termasuk contoh dan rekomendasi praktis. Masyarakat sipil dapat ikut berperan dalam proses pengawasan sektor keamanan dengan beberapa cara, termasuk melalui mekanisme formal maupun informal. Memastikan bahwa isu gender ditangani dan wanita serta organisasi wanita dilibatkan sepenuhnya dapat membuat mekanisme ini menjadi lebih partisipatif dan menyeluruh. Mekanisme pengawasan masyarakat sipil yang tanggap terhadap gender dapat lebih efektif menjamin bahwa kebutuhan dan kepentingan wanita maupun pria dapat diperhatikan dan dimasukkan, dan dengan demikian sektor keamanan bertanggung jawab atas perlindungan semua warga masyarakat.

Sektor keamanan yang transparan, bertanggung jawab dan dikelola secara efektif merupakan bagian terpenting dari proses demokrasi. Pengawasan oleh masyarakat sipil adalah mekanisme penting untuk mendukung perwujudan nilai-nilai demokrasi ini, dengan menyatakan dan mengomunikasikan kebutuhan dan kepentingan keamanan masyarakat kepada para pembuat kebijakan, dan dengan penyediaan keahlian dan pemantauan badan-badan keamanan negara. Pasukan keamanan yang tidak dikelola dengan baik atau tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan peningkatan ketidakamanan dan kesalahan alokasi sumber daya, dan dapat menghambat usaha tata pemerintahan yang baik. Selanjutnya, sektor keamanan yang dikelola secara tidak demokratis dapat dengan mudah digunakan untuk tujuan partisan, atau dapat menyebabkan keruntuhan monopoli negara atas penggunaan kekuatan untuk menyelesaikan masalah.¹ Pengawasan kebijakan, struktur, program, tindakan dan proses reformasi sektor keamanan merupakan salah satu cara memastikan agar standar HAM dan aturan hukum ditegakkan oleh sektor keamanan.

Tool ini dirancang sebagai sumber daya bagi organisasi masyarakat sipil (OMS) yang terlibat dalam pengawasan sektor keamanan, serta OMS yang ingin memainkan peran lebih aktif dalam pengawasan ini. Tool ini juga cocok untuk para pembuat kebijakan dan pejabat pemerintahan nasional, organisasi internasional dan regional, dan negara-negara donor di seluruh dunia yang terlibat dalam merancang dan melaksanakan reformasi sektor keamanan dan dapat memainkan peran aktif dalam memperkuat dan mendukung keterlibatan masyarakat sipil.

Tool ini meliputi:

- Uraian mengenai peran masyarakat sipil dalam mekanisme pengawasan
- Landasan pemikiran di balik pemasukan isu gender dan cara bagaimana pemasukan isu gender ini dapat memperkuat dan meningkatkan pengawasan
- Titik-titik mula untuk memasukkan gender ke dalam berbagai aspek pengawasan masyarakat sipil, termasuk kiat dan contoh
- Gambaran umum mengenai pemasukan gender ke dalam pengawasan masyarakat sipil di negara-negara pasca-konflik, negara-negara dalam masa transisi, negara-negara berkembang dan negara-negara maju.
- Rekomendasi pokok
- Sumber daya tambahan

2 Apa peran masyarakat sipil dalam pengawasan sektor keamanan?

2.1 Apa itu masyarakat sipil?

Masyarakat sipil dapat dipahami sebagai ruang politik yang terdapat di antara individu dan pemerintah:

Masyarakat sipil adalah suatu bidang yang sejajar dengan tapi terpisah dari negara dan pasar, di mana masyarakat bebas berkumpul sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Masyarakat sipil meliputi sektor yang diprakarsai sendiri dan sukarela dari individu-individu yang berhimpun secara formal dan berusaha mencapai tujuan non-komersial di lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi berbasis komunitas, organisasi keagamaan, perhimpunan profesional, serikat pekerja, kelompok mahasiswa, perhimpunan budaya, dll.²

Masyarakat sipil menjalankan berbagai fungsi dalam masyarakat tertentu.

- Mewakili berbagai konstituen dalam suatu masyarakat.
- Memberikan keahlian teknis kepada para pembuat kebijakan dan lembaga pemerintah.

- Pemberdayaan LSM dan organisasi lainnya.
- Memberikan dan menyediakan layanan sebagai pengganti negara.
- Memberikan ruang untuk interaksi dan jaringan sosial³.

Media juga dimasukkan dalam tool ini mengingat peran pentingnya baik dalam mengomunikasikan peran dan tanggung jawab negara dengan masyarakat sipil maupun perannya sebagai penyalur kepentingan dan tuntutan masyarakat sipil kepada para pembuat kebijakan.

2.2 Bagaimana melibatkan masyarakat sipil dalam pengawasan sektor keamanan?

Pengawasan sektor keamanan bisa berupa pengawasan internal maupun eksternal, dan pengawasan ini berlangsung pada berbagai tingkat dan melalui berbagai badan. Pengawasan eksternal sektor keamanan dapat dilakukan dengan dua cara: pertama, oleh sektor keamanan yang bertanggung jawab langsung kepada masyarakat, dan kedua, oleh politisi dan birokrat dalam pemerintahan suatu negara yang bertanggung jawab atas tindakan sektor keamanan. Beberapa badan pengawasan eksternal yang paling umum adalah parlemen, mahkamah konstitusi, badan anti-korupsi dan pertanggungjawaban publik, dan para ombudsman.

Pengawasan masyarakat sipil atas sektor keamanan, termasuk pengawasan reformasi sektor keamanan (RSK), melibatkan partisipasi aktif OMS dalam mendefinisikan kebijakan keamanan dan pengawasan struktur serta praktik para aktor sektor keamanan.⁴ Tujuannya adalah menjamin pemaduan kepentingan dan perspektif tingkat masyarakat dan akar rumput dalam penyediaan keamanan internal dan eksternal, dan untuk mendukung pemilikan lokal dan keberlanjutan. Selain itu, pengawasan masyarakat sipil idealnya mendukung norma-norma demokrasi yang diterima secara internasional mengenai transparansi dan pertanggungjawaban. Pengawasan masyarakat sipil dapat terjadi pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional, dan bisa melibatkan partisipasi OMS baik dalam mekanisme pengawasan formal maupun informal.

Sektor keamanan meliputi:

- Aktor keamanan inti yang meliputi: angkatan bersenjata, polisi, gendarmeries, pasukan paramiliter, badan intelijen dan keamanan, pengawal perbatasan, dan otoritas bea cukai.
- Badan manajemen dan pengawasan keamanan yang meliputi: parlemen dan komite-komite legislatifnya yang terkait; pemerintah/lembaga eksekutif, yang meliputi kementerian pertahanan, kementerian

dalam negeri dan kementerian luar negeri; badan penasihat keamanan nasional; otoritas adat dan tradisi; dan badan manajemen keuangan.

- Lembaga peradilan dan penegakan hukum yang meliputi: kementerian kehakiman, lembaga masyarakatan, badan penyelidik dan penuntut kejahatan, lembaga peradilan, sistem peradilan adat dan tradisi, komisi HAM dan para ombudsman.
- Pasukan keamanan non-reguler yang meliputi: tentara pembebasan, tentara gerilya, satuan pengawal swasta, agen keamanan swasta, agen militer swasta dan satgas partai politik.⁵

Budaya partisipasi dan transparansi merupakan kunci bagi sektor keamanan yang demokratis dan berfungsi dengan baik, dan ini dapat dicapai melalui hubungan dengan masyarakat sipil. Keahlian dan kepentingan otonom masyarakat sipil memberikan fungsi penting pengawasan dan pengimbangan sehubungan dengan kekuasaan negara untuk menentukan masalah keamanan dan pertahanan. Yang paling penting, pemaduan para aktor masyarakat sipil ke dalam pengawasan memberikan kisaran perspektif, kepentingan, informasi dan alternatif yang lebih luas kepada para pembuat kebijakan. Namun demikian, perlu disadari bahwa OMS tidak selalu demokratis atau mewakili kebutuhan atau kepentingan masyarakat, dan dengan demikian pelibatan mereka tidak akan otomatis menghasilkan pengawasan yang efektif.

Cara-cara utama di mana masyarakat sipil berpartisipasi dalam pengawasan sektor keamanan adalah:

- Sebagai sumber nasihat kebijakan dan keahlian teknis yang dapat memberikan informasi kepada pembuat kebijakan dan memberikan pemahaman mengenai kebutuhan dan kepentingan yang berkaitan dengan isu keamanan.
- Dengan meningkatkan pemilikan lokal dan pelibatan melalui keterlibatan berbagai kelompok dalam pembahasan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan keamanan.
- Sebagai pengawas yang akan meminta pertanggungjawaban pemerintah atas tindakan mereka melalui lobi, kampanye kesadaran masyarakat, atau tekanan langsung dari masyarakat.
- Dengan memfasilitasi dialog dan perundingan antara pembuat kebijakan, lembaga dan pejabat sektor keamanan, dan masyarakat.
- Melalui kampanye advokasi yang meningkatkan kesadaran mengenai masalah dan isu keamanan utama, pelanggaran HAM, penyelewengan dana, atau pelanggaran lainnya.
- Melalui pemberian layanan dan penyediaan sumber-sumber keamanan dan keadilan alternatif apabila negara tidak mampu dan/atau tidak mau menerima peran ini, atau apabila masyarakat sipil lebih mampu memberikan layanan ini.

2.3 Apa tantangan terhadap keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan sektor keamanan?

Beberapa tantangan utama dapat menghambat kemampuan masyarakat sipil untuk ikut serta dalam pengawasan yang efektif:

- Tradisi kerahasiaan yang berlaku di sektor keamanan membuat usaha untuk melakukan regulasi atau memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan dan kegiatan sektor keamanan menjadi sulit.
- Pengutamaan urusan keamanan nasional daripada kebebasan sipil dan HAM berarti lebih sedikit lingkup untuk menuntut pertanggungjawaban dari sektor keamanan.
- Kurangnya keahlian dan kemampuan di kalangan OMS untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan sektor keamanan.
- Kurangnya kepercayaan dan/atau transparansi di antara OMS dan sektor keamanan menyulitkan OMS untuk menghubungi para pembuat keputusan utama dan memengaruhi kebijakan dan program keamanan dan pertahanan. Kurangnya kepercayaan atau kerja sama di kalangan OMS itu sendiri bisa juga menimbulkan hambatan.
- Kurangnya kemandirian OMS karena mereka didanai atau dikooptasi oleh unsur-unsur sektor keamanan, yang mengurangi kemandirian mereka.
- Dukungan lembaga donor yang terlalu kecil terhadap transparansi dan pertanggungjawaban demokratis sektor keamanan, di mana lembaga donor lebih mengutamakan bantuan teknis dan efisiensi di sektor keamanan, yang tidak mengutamakan penguatan pengawasan masyarakat sipil.⁶
- Masyarakat sipil yang terpecah di mana organisasi-organisasi tidak mampu bekerja sama atau memberikan dukungan bersama atas isu-isu yang berkaitan dengan pengawasan sektor keamanan. OMS mungkin didominasi oleh kelompok dan organisasi tertentu yang dapat menyebabkan kelompok-kelompok wanita atau organisasi-organisasi pedesaan, misalnya, terpinggirkan dan mengalami kesulitan untuk ikut serta dalam mekanisme pengawasan.

Organisasi masyarakat sipil tidak homogen dan sifat, kemampuan dan strukturnya mungkin sangat bervariasi di antara dan di dalam konteks tertentu. Keanekaragaman ini menimbulkan tantangan sekaligus peluang. Keanekaragaman OMS merupakan salah satu kekuatan terpenting masyarakat sipil karena kekayaan pengetahuan dan pengalaman mereka, serta perspektif dan prioritas mereka yang berbeda, memungkinkan mereka memberikan sumbangan penting dalam berbagai bidang dan isu. Selanjutnya, OMS mungkin lebih dapat mengawasi sektor keamanan mengingat kedudukan mandiri mereka memungkinkan mereka lebih kritis terhadap para aktor dan struktur keamanan negara.

Ini merupakan tantangan bagi lembaga-lembaga

donor yang karena berbagai alasan mungkin akhirnya bekerja sama dengan OMS yang paling dikenal dan mapan, walaupun OMS ini mungkin tidak mewakili kepentingan sebagian besar aktor lokal. Apabila OMS tidak dianggap jujur oleh masyarakat yang lebih luas, atau oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, maka hal ini dapat mengurangi efektivitas OMS dan juga kemampuan mereka untuk memberikan sumbangan konstruktif terhadap mekanisme pengawasan. OMS yang ikut serta dalam pengawasan sangat perlu memiliki jaringan yang tidak hanya mencakup ibu kota dan kelompok elit yang sering mendominasi struktur formal.

Pemanfaatan keanekaragaman perspektif untuk menjamin keterwakilan dan kejujuran yang menyeluruh, sambil mengakui bahwa sebagian OMS memiliki lebih banyak pengalaman, kemampuan dan akses atas mekanisme pengawasan daripada OMS lainnya, merupakan tantangan yang dihadapi oleh OMS itu sendiri maupun para aktor eksternal yang berusaha mendukung keterlibatan mereka di sektor keamanan.

3 Mengapa gender penting dalam pengawasan masyarakat sipil?

Gender merujuk pada peran dan hubungan, ciri kepribadian, sikap, tingkah laku dan nilai-nilai tertentu yang dihubungkan masyarakat dengan pria dan wanita. Karena itu, 'gender' merujuk pada perbedaan yang dipelajari antara pria dan wanita, sedangkan 'jenis kelamin' merujuk pada perbedaan biologis antara lelaki dan perempuan. Peran gender sangat bervariasi di dalam dan antarkebudayaan dan dapat berubah sepanjang waktu. Gender bukan hanya merujuk pada wanita atau pria tapi juga merujuk pada hubungan di antara mereka.

Pengarusutamaan gender adalah proses menilai implikasi terhadap wanita dan pria dari suatu tindakan yang terencana, yang meliputi pembuatan undang-undang, kebijakan atau program di semua bidang dan pada semua tingkatan.⁷

Untuk informasi lebih lanjut lihat Tool mengenai RSK dan Gender

Secara umum, peran dari suatu proses pengawasan adalah memperkuat struktur, kebijakan dan mekanisme yang ada untuk menjamin agar sektor keamanan dapat diminta bertanggung jawab dalam keuangan dan tindakannya. Ada berbagai cara di mana pema-

duan perspektif gender dan keterlibatan penuh organisasi wanita memperkuat pengawasan masyarakat sipil atas sektor keamanan, termasuk meningkatkan pemilikan lokal, efektivitas dan pertanggungjawaban.

Kepatuhan terhadap kewajiban menurut undang-undang dan instrumen hukum internasional

Mengambil prakarsa untuk memadukan isu gender ke dalam reformasi pertahanan bukan sekedar masalah efektivitas operasional; pemaduan ini harus mematuhi undang-undang, instrumen hukum, dan norma internasional dan regional mengenai keamanan dan gender. Instrumen hukum utama meliputi:

- Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979)
- Deklarasi dan Pijakan Aksi Beijing (1995)
- Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 mengenai Wanita, Perdamaian dan Keamanan (2000)

Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Lampiran Toolkit mengenai Undang-Undang dan Instrumen Hukum Internasional dan Regional.

3.1 Penguatan pemilikan lokal

'Keterlibatan masyarakat sipil dalam program RSK merupakan prasyarat bagi pemilikan lokal dan, akhirnya, keberlanjutan yang lebih luas dan lebih inklusif. Organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting yang dapat dimainkan mengingat potensi mereka untuk menyuarakan kepentingan dan masalah masyarakat yang lebih luas dan mendorong pembenahan yang merespons kebutuhan keamanan dan keadilan masyarakat.'

Buku Pedoman OECD-DAC mengenai Reformasi Sistem Keamanan⁸

Walaupun memerlukan waktu, dialog, kerja sama dan kompromi ekstensif di antara berbagai aktor, pemilikan lokal sangat penting bagi pembentukan sektor keamanan yang demokratis, transparan dan bertanggung jawab. Namun demikian, lembaga-lembaga donor dan para aktor eksternal lainnya kadang-kadang masih memaksakan model, kebijakan dan program terhadap para pemangku kepentingan lokal, walaupun model, kebijakan dan program tersebut tidak mencerminkan prioritas atau kepentingan mereka.⁹ Konsekuensi dari pendekatan top-down sangat jelas: 'Pentingnya pemilikan lokal merupakan masalah penghormatan sekaligus keharusan pragmatis. Intinya adalah bahwa pembenahan yang tidak dibentuk dan digerakkan oleh para aktor lokal tidak mungkin terlaksana dengan baik dan berkelanjutan. Apabila tidak ada pemilikan lokal, RSK pasti gagal.'

Pemaduan isu gender dapat menghasilkan dan

memperkuat pemilikan lokal dengan menjamin bahwa pria dan wanita dilibatkan dan berperan dalam pembentukan atau reformasi sektor keamanan yang berdampak terhadap masyarakat dan negara mereka. Pemaduan isu gender juga menyoroti pentingnya melibatkan organisasi wanita sebagai pemangku kepentingan lokal utama (lihat 3.3). Selanjutnya, tanpa pemilikan lokal dan, khususnya, tanpa keterlibatan perspektif dan aktor lokal dalam proses pembenahan atau penguatan sektor keamanan, pemaduan pendekatan gender akan hampir mustahil. Langkah yang diperlukan dalam pemaduan perspektif gender ke dalam sektor keamanan meliputi keterlibatan dengan semua warga masyarakat untuk mengidentifikasi peran, tanggung jawab, kemampuan, kebutuhan dan kepentingan mereka yang berkaitan dengan penyediaan keamanan. Proses menghasilkan pemahaman ini hanya dapat terwujud apabila para aktor lokal dilibatkan dan terlibat aktif dalam isu-isu yang berkaitan dengan keamanan.

Lembaga-lembaga donor, seperti Departemen Pembangunan Internasional Inggris dan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD, Organisation for Economic Cooperation and Development), telah mengakui bahwa tanpa pemilikan lokal, reformasi sektor keamanan tidak mungkin berhasil.¹⁰ Walaupun tingkat pemilikan lokal RSK memang sangat tergantung pada kemampuan masyarakat sipil untuk berpartisipasi dan kemauan politik pemerintah untuk menggunakan pendekatan yang inklusif, para aktor eksternal dapat juga memainkan peran dalam mendukung keterlibatan dan partisipasi yang lebih luas dalam program dan proyek yang diprakarsai oleh para aktor lokal.¹¹

3.2 Mekanisme pengawasan yang efektif dan menyeluruh melalui pemaduan isu gender

Perspektif gender penting bagi pengawasan masyarakat sipil karena beberapa alasan, salah satu di antaranya karena perspektif gender membantu menyadari bahwa masyarakat tertentu bukan suatu kelompok masyarakat yang homogen dan terdiri dari banyak kebutuhan dan kepentingan keamanan yang berbeda. Peran dan tanggung jawab yang dipikul oleh pria dan wanita sehubungan dengan sektor keamanan juga bisa sangat bervariasi dan seringkali dihasilkan dari gagasan-gagasan sosial mengenai gender. Misalnya, pria sering diharapkan sebagai penyedia keamanan di dalam keluarga mereka dan masyarakat dan biasanya jauh lebih berisiko mengalami kekerasan yang berkaitan dengan senjata. Di sisi lain, wanita sering memiliki kebutuhan keamanan khusus, seperti perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, yang mungkin tidak ditangani sebagaimana mestinya oleh penegakan hukum atau sistem peradilan. Mengingat bahwa sektor keamanan bertugas menyediakan keamanan dan keadilan bagi pria maupun wanita, maka proses pengawasan masyarakat sipil harus memadukan isu gender ke dalam fungsi pengawasan mereka untuk menjamin agar sistem dan

struktur yang ada melindungi kebutuhan semua orang, bukan hanya sektor-sektor yang paling menonjol atau istimewa dalam masyarakat.

Melalui fungsi analisis, pemantauan dan pengawasan mereka, masyarakat sipil dapat mengetahui mereka yang terpinggirkan dari proses pembuatan keputusan sektor keamanan dan golongan masyarakat mana yang kurang mendapatkan akses atau pemilikan atas mekanisme dan perlindungan sektor keamanan.

Menjamin agar suara-suara yang terpinggirkan menjadi bagian dari proses tersebut merupakan peran penting dari setiap mekanisme pengawasan. Pada gilirannya hal ini dapat meningkatkan keterlibatan organisasi wanita dalam proses pembuatan keputusan keamanan.¹²

Lembaga dan individu yang bertugas menyediakan keamanan kadang-kadang bisa juga menjadi sumber ketidakamanan bagi masyarakat umum, khususnya bagi wanita dan kelompok masyarakat yang terpinggirkan yang mungkin menghadapi kekerasan yang dilakukan pasukan keamanan. Kekerasan ini, termasuk kekerasan berbasis gender (GBV), mungkin dilakukan oleh personel sektor keamanan atau disebabkan oleh perundang-undangan, kebijakan dan struktur yang membentuk aturan hukum. Apabila mekanisme pengawasan masyarakat sipil tidak mempertimbangkan isu gender, struktur, kebijakan dan budaya sektor keamanan akan terus membiarkan GBV terhadap wanita, pria, anak lelaki dan anak perempuan; ketidaksetaraan gender; dan praktik-praktik peminggiran. Hal ini sendiri merupakan pembenaran yang kuat untuk menjamin agar pengawasan masyarakat sipil melibatkan perspektif semua kelompok dalam masyarakat tertentu.

Perlu diperhatikan bahwa pengawasan tidak hanya berkaitan dengan struktur dan prosedur formal, tapi juga melibatkan identifikasi faktor-faktor yang kurang diperhitungkan seperti tradisi, budaya politik dan aturan perilaku informal lainnya yang memainkan peran dalam menentukan pertanggungjawaban sektor keamanan.¹³ Dinamika gender merupakan kekuatan perantara yang efektif dalam membentuk semua faktor ini, dan dengan demikian pemahaman bagaimana dinamika gender mempengaruhi sektor keamanan dapat mengidentifikasi titik mula dan mekanisme untuk menghasilkan praktik yang lebih bertanggung jawab dan transparan.

3.3 Peningkatan pengawasan melalui keterlibatan organisasi wanita

Organisasi masyarakat sipil wanita seringkali menjadi sumber daya yang tak dimanfaatkan ketika berusaha menjamin pengawasan yang efektif atas sektor keamanan. Dalam kasus di mana negara kurang mampu menyediakan keamanan dan keadilan bagi semua masyarakat, kelompok-kelompok wanita dapat memainkan peran dengan membangun rumah aman bagi korban GBV; mendukung pembenahan hukum

yang tanggap terhadap gender; meningkatkan kesadaran di kalangan pria dan wanita mengenai hak-hak asasi mereka dan kewajiban negara melindungi mereka; dan menyediakan berbagai layanan lainnya serta berbagai bentuk pembangunan kemampuan di dalam masyarakat mereka. Keahlian dan pemahaman mereka mengenai kebutuhan keamanan dan keadilan berbagai kelompok masyarakat tidak dapat diabaikan. Organisasi-organisasi wanita dapat meningkatkan pengawasan sektor keamanan yang tanggap terhadap gender melalui:

- Pemberian nasihat kebijakan yang tanggap terhadap gender mengenai peningkatan transparansi, pertanggungjawaban dan responsivitas.
- Pemantauan pelaksanaan persetujuan internasional dan regional, dan juga kebijakan nasional dan institusional mengenai kesetaraan gender sehubungan dengan lembaga-lembaga sektor keamanan.
- Penyediaan bantuan pembangunan kemampuan bagi badan-badan pemerintahan dan pengawasan mengenai isu gender dan keamanan.
- Pemberian bantuan untuk menjamin agar pengawasan menyeluruh dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat melalui identifikasi ancaman dan isu keamanan yang dihadapi individu dan masyarakat, khususnya 'kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan'.
- Pemfasilitasian dialog dan perundingan antara masyarakat lokal dan badan pengawasan sektor keamanan.
- Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bagaimana meminta pertanggungjawaban lembaga-lembaga sektor keamanan, misalnya dengan melaporkan penganiayaan yang dilakukan polisi.
- Promosian wanita dalam pembuatan keputusan dan kepemimpinan di lembaga-lembaga sektor keamanan dan badan pengawasan.

Manfaat lain dari pelibatan organisasi wanita dalam pengawasan sektor keamanan adalah kemampuan mereka berhubungan dengan masyarakat yang sulit dijangkau. Mengingat bahwa mereka sering dianggap kurang menakutkan, wanita kadang-kadang lebih mudah bergerak dalam konteks konflik, dan karena itu memiliki informasi dan pemahaman yang lebih akurat mengenai kebutuhan keamanan warga masyarakat yang paling terdampak. Namun demikian, walaupun usaha menjamin partisipasi penuh dan setara wanita dan organisasi wanita merupakan salah satu langkah menuju OMS yang benar-benar representatif, usaha itu saja tidak akan menghasilkan pencapaian kesetaraan gender. Perspektif gender perlu juga diarusutamakan di seluruh aspek pengawasan masyarakat sipil untuk menjamin agar masalah, kebutuhan, kepentingan dan perspektif pria maupun wanita dipertimbangkan (untuk informasi lebih lanjut mengenai hal ini, lihat Bagian 5).

Kenyataannya mungkin sulit untuk menjamin bahwa perspektif gender benar-benar dipadukan ke dalam pengawasan masyarakat sipil karena kurangnya keahlian, sumber daya, kemauan politik, waktu dan faktor-faktor lainnya. Namun demikian, penyusunan

strategi untuk memadukan isu gender dan lebih aktif melibatkan organisasi wanita dalam proses ini dapat memberikan dampak positif terhadap efektivitas keseluruhan dari pengawasan masyarakat sipil. Beberapa konsekuensi potensialnya adalah:

Pemahaman yang lebih lengkap mengenai struktur dan proses keamanan melalui pelibatan semua pemangku kepentingan utama di dalam masyarakat, termasuk wanita dan kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Mereka memberikan perspektif, pengetahuan dan pengalaman yang berbeda dalam pengawasan sektor keamanan yang memberikan pemahaman dan strategi alternatif untuk meningkatkan keamanan secara keseluruhan dalam konteks tertentu. Pelibatan wanita juga bisa membuat pria berpikir dengan cara yang berbeda mengenai diri mereka sendiri sebagai penyedia keamanan dan juga ketidakamanan mereka sendiri.

- Membuat isu-isu keamanan utama seperti kekerasan terhadap wanita menjadi lebih 'terlihat'. Hal ini memungkinkan mekanisme pengawasan untuk lebih efektif mengidentifikasi, memantau dan mendukung isu-isu ini.
- Meningkatkan legitimasi mekanisme pengawasan melalui peningkatan partisipasi dan keterwakilan kebutuhan dan kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok masyarakat yang dominan.

4 Bagaimana memadukan gender ke dalam pengawasan masyarakat sipil atas sektor keamanan?

Ada beberapa titik mula utama untuk memadukan isu gender secara efektif ke dalam proses pengawasan masyarakat sipil atas sektor keamanan dan RSK. Harus diingat bahwa hal ini tidak akan terjadi secara otomatis, tapi tingkat tertentu kemauan politik, sumber daya dan kemampuan diperlukan agar terjadi pengarusutamaan gender yang efektif. Selain itu, sebagaimana pendanaan memadai yang sangat diperlukan demi pengawasan yang efektif, pendanaan yang secara khusus ditujukan untuk memadukan isu gender juga sangat penting.

Peluang dan titik mula untuk memadukan gender ke dalam proses pengawasan masyarakat sipil akan bervariasi sesuai dengan konteks tertentu, termasuk kemampuan OMS, kebutuhan keamanan dan keadilan, dan lembaga sektor keamanan tertentu yang terlibat. Pemaduan gender ke dalam pengawasan mungkin melibatkan, namun tidak terbatas pada, langkah-langkah berikut:

- Menjamin prosedur penghukuman yang transparan dan adil.

- Menetapkan standar perilaku dan kode etik minimum bagi personel badan keamanan.
- Menjamin agar kebutuhan spesifik gender diidentifikasi dan dipadukan ke dalam struktur dan praktik sektor keamanan.
- Mengadvokasi lebih banyak wanita di badan-badan keamanan, terutama pada tingkat pembuat keputusan senior.
- Meningkatkan kesadaran mengenai isu-isu keamanan utama di kalangan masyarakat umum, terutama yang berkaitan dengan wanita dan kelompok masyarakat yang rentan.
- Menyalurkan pengaduan dari masyarakat kepada individu atau organisasi yang sesuai di sektor keamanan.

Rekomendasi yang diberikan pada bagian ini bersifat umum. Untuk rekomendasi dan informasi yang lebih terperinci mengenai keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan sektor keamanan dalam konteks negara pasca-konflik, negara dalam masa transisi, negara berkembang dan negara maju, lihat Bagian 5.

4.1 Badan pemantauan sektor keamanan

Masyarakat sipil dapat berpartisipasi dalam berbagai badan pengawas sektor keamanan resmi, seperti badan pemeriksa orang sipil, komisi pengaduan masyarakat, tim teknis pakar dan kelompok pemantau independen, serta evaluasi yang disponsori negara atas aspek-aspek sektor keamanan seperti lembaga pemasyarakatan, perilaku polisi, dan lain-lain. Badan-badan ini bertugas menilai, memantau atau mengevaluasi lembaga-lembaga sektor keamanan dan karena itu merupakan titik mula penting untuk menjamin agar isu gender ditangani dan para wanita serta organisasi wanita berpartisipasi. Masyarakat sipil dapat ikut serta dalam mekanisme pengawasan parlemen dengan bekerja sama dengan para anggota parlemen untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan parlemen mengenai isu-isu yang berkaitan dengan keamanan atau memprakarsai perdebatan mengenai isu-isu tersebut.

Lihat Tool mengenai Pengawasan Parlemen atas Sektor Keamanan dan Gender

Mengingat pengetahuan dan pengalaman khususnya mengenai penyediaan keamanan dan kebutuhan wanita dalam masyarakat, organisasi wanita dapat memberikan nilai tambah penting bila dilibatkan dalam peran partisipatif atau konsultatif di badan-badan pemantauan:

- Di Fiji, LSM wanita yang bekerja sama dengan Kementerian Urusan Wanita mengadakan pertemuan dengan Komite Peninjauan Ulang

Keamanan dan Pertahanan Nasional Pemerintah Fiji sebagai bagian dari proses peninjauan ulangnya pada tahun 2003. Organisasi wanita dapat mengemukakan isu-isu penting seperti:

- Cara bagaimana proses peninjauan ulang dilakukan.
- Siapa yang diminta memberikan masukan.
- Isu-isu yang diidentifikasi sebagai ancaman keamanan.
- Bagaimana standar dan norma internasional, termasuk Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325, dipadukan ke dalam proses tersebut.

Karena itu, dua proposal diserahkan kepada Komite tersebut, termasuk rekomendasi untuk pengangkatan tetap Menteri Urusan Wanita dalam Dewan Keamanan Nasional dan keterwakilan wanita dalam komite keamanan tingkat provinsi dan kabupaten.¹⁴

- Di Kamboja, organisasi-organisasi wanita dan kelompok-kelompok HAM seperti Liga Promosi dan Pembelaan HAM Kamboja bekerja sama dengan badan-badan pengawasan pemerintah untuk menyelidiki tuduhan penganiayaan dan memantau kepatuhan terhadap Undang-Undang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Korban yang baru-baru ini diterapkan di Kamboja. Undang-undang ini memberikan kekuasaan yang

lebih besar kepada polisi untuk melakukan intervensi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan memperkuat sumber daya hukum yang tersedia bagi korban. Selain melakukan pemantauan, OMS juga menyediakan bantuan hukum dan rumah aman bagi korban.¹⁵

Selain melibatkan organisasi wanita, idealnya harus terdapat keterwakilan setara pria dan wanita di badan-badan pengawasan. Kurangnya partisipasi wanita saat ini mungkin disebabkan oleh beberapa hambatan seperti:

- Kurangnya waktu atau kesempatan bagi wanita untuk ikut serta karena tanggung jawab rumah tangga mereka.
- Sikap sosio-kultural yang menghambat wanita berpartisipasi di lembaga-lembaga sektor keamanan di lingkungan publik.
- Kurangnya keahlian untuk memberikan masukan yang konstruktif.

Banyak dari hambatan ini dapat ditanggulangi melalui pelatihan, peningkatan kesadaran dan kebijakan proaktif di pihak OMS yang berpartisipasi di badan-badan pemantauan dan pengawasan. Hal ini akan menguntungkan mekanisme pemantauan secara keseluruhan dengan menjamin aksesnya keahlian, pengetahuan dan sumber daya yang lebih luas.

Gender perlu diarusutamakan melalui semua kegiatan

Kotak 1 Contoh daftar periksa gender untuk badan pengawasan sektor keamanan dalam konteks pasca-konflik.¹⁶

- Apakah situasi keamanan menimbulkan dampak yang berbeda terhadap wanita, pria, anak perempuan dan anak lelaki?
- Apakah isu keamanan wanita dan pria diketahui dan masalah diatasi?
- Apakah pemelihara perdamaian wanita digelar? Kalau demikian, pada tingkat apa?
- Apakah pemelihara perdamaian mendapat pelatihan gender sebelum penggelaran dan selama misi pemeliharaan perdamaian?
- Apa peran yang dimainkan para wanita dalam militer, kelompok bersenjata, kepolisian atau lembaga keamanan lainnya seperti badan intelijen, polisi perbatasan, pabean, imigrasi dan badan penegakan hukum lainnya (persentase pasukan/ kelompok menurut pangkat dan kategori)?
- Apakah tindakan didukung untuk menjamin agar wanita dapat menjadi bagian dari militer, kepolisian atau lembaga keamanan lainnya?
- Apa kebutuhan pelatihan wanita dan pria di militer dan kelompok bersenjata?
- Apakah pelatihan gender diberikan kepada tentara dan badan keamanan lainnya?

Kotak 2 Data yang dipisahkan menurut jenis kelamin¹⁸

Data yang dipisahkan menurut jenis kelamin (yaitu, informasi statistik yang membedakan pria dan wanita) merupakan sumbangan penting bagi penelitian dan pengumpulan data sektor keamanan yang tanggap terhadap gender. Data ini dapat memperjelas ancaman, kebutuhan, persepsi dan sumber daya keamanan dan keadilan pria dan wanita yang berbeda, yang pada gilirannya merupakan alat yang sangat berharga untuk mendorong pembenahan yang tanggap terhadap gender.

Data yang dipisahkan menurut jenis kelamin dapat digunakan untuk:

- Mengidentifikasi ancaman yang berbeda terhadap keamanan dan keadilan yang dihadapi wanita, pria, anak lelaki dan anak perempuan, termasuk bagaimana ancaman ini berubah sepanjang waktu.
- Mengevaluasi apakah layanan keamanan dan keadilan diberikan secara setara kepada pria dan anak lelaki, wanita dan anak perempuan.
- Secara umum, mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah, menyusun semua pilihan dan memilih pilihan yang akan paling efektif dan menguntungkan bagi wanita maupun pria.
- Mengalokasikan sumber daya dengan cara yang lebih adil.
- Memantau dan mengevaluasi kebijakan dan program keamanan menurut dampak khususnya terhadap pria, wanita, anak perempuan dan anak lelaki.

badan pemantauan, dan harus tersedia struktur dan proses yang memadai untuk memastikan terjadinya pengarusutamaan ini. Namun demikian, mungkin terdapat kecenderungan untuk mengabaikan isu gender dalam pemantauan sektor keamanan atau kecenderungan untuk menganggap isu gender tidak relevan dengan isu keamanan. Salah satu cara mengatasi hal ini adalah dengan memberikan pelatihan gender kepada para partisipan di badan-badan pemantauan sektor keamanan agar mereka mampu mengidentifikasi kesempatan untuk memadukan gender dan membekali mereka dengan keahlian praktis seperti bagaimana memantau pelanggaran HAM terhadap wanita dan anak perempuan. Daftar periksa atau panduan mengenai pemaduan gender mungkin berguna (lihat Kotak 1).

OMS yang berkemampuan melakukan penelitian dan analisis, seperti pusat-pusat penelitian, tim pakar dan lembaga kebijakan mungkin sangat mampu memberikan masukan bagi badan-badan pemantauan sektor keamanan. OMS yang memiliki keahlian teknis sangat perlu dimintai masukannya mengenai isu-isu yang berkaitan dengan gender yang dihadapi badan-badan pengawasan, misalnya dalam membenahan perundang-undangan yang diskriminatif.

Kiat memadukan gender bagi OMS yang terlibat dalam badan pemantauan sektor keamanan

- Berikan pelatihan gender kepada badan-badan pemantauan sektor keamanan, termasuk partisipan OMS, untuk meningkatkan kemampuan mereka memadukan isu gender.

Kotak 3 | Panduan mengenai pencatatan pelanggaran HAM

'Documenting women's rights violations by non-state actors: Activist strategies from Muslim communities', (*Pencatatan pelanggaran HAM wanita yang dilakukan oleh para aktor bukan negara: Strategi aktivis dari masyarakat Muslim*), Jan Bauer dan Anissa Hélie, Rights & Democracy and Women living under Muslim laws (*HAM & Demokrasi serta Wanita yang hidup di bawah undang-undang Muslim*), 2006.

'Monitoring and Reporting Human Rights Abuses in Africa: A Handbook for Community Activists' (*Memantau dan Melaporkan Pelanggaran HAM di Afrika: Buku Pedoman bagi Aktivis Masyarakat*), Amnesty International (Amnesti Internasional), 2002.

Elizabeth Shrader, 'Methodologies to Measure the Gender Dimensions of Crime and Violence' (*Metodologi Pengukuran Dimensi Gender Kejahatan dan Kekerasan*), World Bank (Bank Dunia), 2001.

'Researching Violence against Women: A Practical Guide for Researchers and Activists' (*Meneliti Kekerasan terhadap Wanita: Panduan Praktis bagi Peneliti dan Aktivis*), Mary Ellsberg dan Lori Heise, WHO dan PATH, 2005.

- Susun daftar periksa gender untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi yang berbeda untuk menjamin agar isu gender dipadukan secara sistematis.
- Pastikan agar organisasi wanita dilibatkan dan/atau diminta memberikan masukan.
- Advokasi partisipasi setara pria dan wanita dalam badan pemantauan.

4.2 Penelitian dan pengumpulan data

Pengawasan yang akurat dan efektif sangat tergantung pada keberadaan penelitian dan data yang jelas, representatif dan menyeluruh mengenai kegiatan dan perilaku sektor keamanan. OMS dapat memainkan peran penting dalam pemantauan dan pengumpulan informasi independen yang akhirnya dapat digunakan untuk mengungkap kasus penganiayaan, meminta pertanggungjawaban sektor keamanan, atau mengidentifikasi saran-saran mengenai bagaimana memperkuat sektor keamanan. Namun demikian, penelitian dan pengumpulan data mengenai sektor keamanan sering tidak mempertimbangkan isu gender.

Sebagaimana disebutkan pada bagian awal tool ini, pengalaman dan persepsi keamanan dan keadilan sangat bervariasi antara pria dan wanita. Agar penelitian dan data, baik yang dikumpulkan atau digunakan oleh badan pengawasan, mencerminkan secara akurat semua perspektif, penelitian dan data tersebut harus dipisahkan menurut jenis kelamin dan memberikan perhatian khusus pada isu gender. Indikator dan ukuran perubahan yang tanggap terhadap gender juga perlu dimasukkan untuk memungkinkan pemantauan dan evaluasi kemajuan.¹⁷

Data dan penelitian mengenai sektor keamanan dapat berperan sebagai landasan yang akurat untuk menentukan pengaruh dari kebijakan dan program keamanan. Mengingat bahwa para aktor masyarakat sipil biasanya memiliki akses lebih besar terhadap masyarakat lokal daripada pasukan keamanan negara, mereka lebih mampu mengumpulkan informasi ini, idealnya melalui proses konsultatif dan partisipatif yang melibatkan semua warga masyarakat. Prakarsa khusus harus diambil untuk menjamin partisipasi penuh wanita dan anak perempuan serta pria dan anak lelaki yang terpinggirkan. Misalnya, di Afghanistan mungkin sulit bagi para wanita untuk berpartisipasi dalam konsultasi tanpa disertai pendamping pria. Dalam hal ini, perlu dipastikan agar OMS menyediakan sumber daya yang memadai agar wanita dapat berpartisipasi (yaitu, ikut menyediakan akomodasi dan makanan bagi rekan seperjalanannya). Selain menghasilkan data yang dipisahkan menurut jenis kelamin, metode pengumpulan datanya harus transparan dan hasilnya dipublikasikan. Melibatkan organisasi wanita dalam pengumpulan dan analisis data bisa menjadi salah satu cara meningkatkan akses terhadap wanita di dalam masyarakat dan meningkatkan pemahaman mengenai kebutuhan dan masalah keamanan khusus.

Selain menjamin bahwa data yang dikumpulkan dipisahkan menurut jenis kelamin dan penelitian melibatkan wanita dan anak perempuan, penelitian dan pengumpulan data bisa juga difokuskan pada pencatatan pelanggaran HAM wanita dan anak perempuan (lihat Kotak 3). Organisasi-organisasi wanita yang berpengalaman membantu para penyintas GBV bisa lebih dibekali untuk melakukan penelitian mendalam mengenai topik tersebut. Namun demikian, survei dan dokumentasi umum pelanggaran HAM juga harus melibatkan para wanita, anak perempuan dan anak lelaki dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan khusus mengenai GBV. Penelitian harus dilakukan baik mengenai tingkat kejadian dan pencegahan pelanggaran HAM dalam masyarakat secara umum maupun mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh personel sektor keamanan.

Apabila informasi dan data yang peka terhadap gender telah dikumpulkan, informasi dan data tersebut harus disebarluaskan secara efektif untuk memastikan dampak ke bawah terhadap masyarakat lokal maupun dampak ke atas terhadap para pembuat keputusan utama di sektor keamanan dan sektor pemerintahan lainnya. Data yang telah dikumpulkan ini kenyataannya sering tidak dimasukkan ke dalam kebijakan, laporan atau penilaian sektor keamanan. Karena itu, masyarakat sipil harus menegaskan bahwa data dan penelitian tersebut digunakan secara efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui:

- Komunikasi atau kontak langsung dengan para pembuat kebijakan tertentu yang bekerja di bidang yang berbeda di sektor keamanan.
- Kampanye publik mengenai isu-isu utama, yang didasarkan pada penelitian dan data yang dikumpulkan.
- Penyusunan penelitian dan data menjadi evaluasi/ analisis/rangkuman mengenai aspek-aspek utama sektor keamanan yang dapat dipublikasikan secara luas dan digunakan sebagai sebuah alat advokasi dalam berhubungan dengan para pejabat pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya.
- Penggunaan metode inovatif untuk menyebarkan informasi, seperti melalui stasiun radio masyarakat, jaringan online atau pusat informasi keliling.
- Adaptasi penelitian dan data ke dalam format tak-tertulis (yaitu, poster, komik, sandiwara, lagu, dll.) agar dapat diakses oleh masyarakat yang buta huruf

! Kiat bagi OMS untuk meningkatkan penggunaan penelitian dan pengumpulan data yang peka terhadap gender

- Berikan pelatihan kepada staf OMS mengenai metode penelitian dan pengumpulan data yang peka terhadap gender.
- Pastikan agar data yang dipisahkan menurut jenis kelamin dan penelitian yang peka terhadap gender dimasukkan ke dalam analisis mengenai sektor keamanan.

- Gunakan penelitian yang peka terhadap gender untuk menyiapkan kampanye publik mengenai isu-isu keamanan yang khusus mengenai wanita (misalnya, kekerasan dalam rumah tangga) dan pria (misalnya, penyalahgunaan senjata api kecil).
- Susun beberapa strategi yang inovatif untuk menyebarkan hasil penelitian yang peka terhadap gender, khususnya kepada masyarakat dan perempuan pedesaan.

4.3 Audit gender

Audit gender merupakan alat khusus untuk menganalisis proses, struktur, kebijakan atau organisasi tertentu dari perspektif gender. Audit ini memberikan evaluasi mengenai apa yang telah dilakukan dan dapat juga mengidentifikasi titik mula atau kesenjangan bagi tindakan di masa depan. Penilaian gender yang diterapkan di sektor keamanan dapat digunakan untuk menentukan sampai sejauh mana lembaga-lembaga sektor keamanan memenuhi kebutuhan para wanita, pria, anak lelaki dan anak perempuan; apakah tempat kerja tidak diskriminatif; hambatan terhadap peningkatan partisipasi perempuan; dan tingkat umum responsivitas gender dalam kebijakan dan praktik. OMS, baik sebagai peserta di badan-badan pemantauan atau sebagai lembaga independen, dapat melakukan audit gender apabila mereka memiliki keahlian dan sumber daya yang diperlukan dan diberi akses yang diperlukan untuk berhubungan dengan para pejabat sektor keamanan.

Lihat Tool mengenai Penilaian, Pemantauan dan Evaluasi RSK dan Gender

! Kiat bagi OMS yang ingin melakukan audit gender

- Masukkan audit gender sebagai bagian dari penilaian atau evaluasi RSK.
- Padukan pertanyaan-pertanyaan gender ke dalam mekanisme penilaian atau evaluasi rutin sektor keamanan.
- Terus jalin hubungan dengan para pemangku kepentingan utama sehubungan dengan temuan-temuan audit untuk menjamin dampaknya terhadap pembenahan.

4.4 Analisis anggaran gender (Gender budget analysis)

Alat lain untuk pengawasan sektor keamanan adalah analisis atas anggaran yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan dari perspektif gender. Karena anggaran pertahanan sering merupakan bagian yang signifikan dari pengeluaran suatu negara,

penguatan transparansi dan pengawasan fiskal merupakan peran utama badan-badan pengawasan, dan merupakan usaha yang dapat didukung oleh OMS. Uang yang dibelanjakan untuk keperluan pertahanan diambil dari dana yang dianggarkan untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti penyediaan atau pembangunan layanan sosial. Dengan demikian, alokasi anggaran pemerintah dapat menimbulkan dampak yang berbeda terhadap pria, wanita, anak perempuan dan anak lelaki yang mungkin relatif mendapatkan manfaat dari jenis pengeluaran tertentu. Analisis anggaran gender telah muncul sebagai suatu alat untuk menganalisis dampak yang dibedakan menurut gender dari pengeluaran pemerintah, yang dapat diterapkan pada sektor keamanan. Dengan demikian, analisis ini dapat menghasilkan alokasi dana yang lebih adil, bertanggung jawab dan transparan, serta pertumbuhan dan pembangunan efektif secara keseluruhan, karena lebih banyak kelompok di dalam masyarakat yang akan mendapatkan manfaat positif dari pengeluaran pemerintah.²⁰

Mengingat bahwa sektor keamanan sering tertutup bagi pengamatan yang teliti, usaha mendapatkan data dan informasi yang akurat mengenai besarnya alokasi pengeluaran dan sumber daya pertahanan mungkin sulit, dan usaha mendapatkan informasi yang dipisahkan menurut jenis kelamin bahkan lebih sulit lagi. Walaupun pemerintah atau parlemen dapat melakukan analisis gender atas pengeluaran mereka sendiri, OMS bisa juga memantau dan mengevaluasi alokasi sumber daya dan mendukung para pembuat kebijakan untuk mengubah pola pengeluaran pemerintah. Jelasnya, OMS, lembaga penelitian dan badan pengawasan yang mengelola sektor keamanan dapat membentuk koalisi untuk memperkuat analisis mengenai berbagai aspek pengeluaran pemerintah, dan menyusun rencana kerja yang kreatif untuk mendukung alokasi anggaran yang lebih peka terhadap gender.

Analisis anggaran gender (gender budget analysis) merupakan usaha yang sangat teknis, dan dengan demikian OMS mungkin harus menjangkau para aktor luar yang dapat memberikan keahlian dan dukungan yang diperlukan. OMS internasional bisa sangat membantu dalam hal ini dan dapat memberikan dukungan kepada organisasi-organisasi lokal yang ingin menganalisis dampak dari pengeluaran sektor keamanan terhadap masyarakat.

Kiat bagi OMS dalam penyusunan anggaran yang peka terhadap gender

- Kembangkan keahlian dalam analisis anggaran gender untuk lebih memahami dampak dari pengeluaran sektor keamanan terhadap pria dan wanita, dan gunakan temuan dari analisis ini sebagai alat pengawasan dan advokasi.

4.5 Advokasi dan peningkatan kesadaran

Organisasi masyarakat sipil memainkan fungsi

pengawasan penting melalui peningkatan kesadaran masyarakat mengenai peran, tanggung jawab dan kewajiban sektor keamanan, dan juga advokasi langsung terhadap lembaga-lembaga sektor keamanan dan badan-badan pemerintahan. Penelitian dan pengumpulan data yang peka terhadap gender, termasuk penilaian gender dan analisis anggaran gender, dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran dan prakarsa advokasi.

OMS dapat mengadvokasi pembenahan untuk memperkuat transparansi, pertanggungjawaban dan efektivitas sektor keamanan. Mengingat partisipasi OMS yang umumnya terbatas dalam kegiatan sektor keamanan, saluran advokasi yang ada bisa menjadi titik mula penting untuk advokasi sektor keamanan. Beberapa bidang advokasi yang sangat relevan dengan pemaduan perspektif gender dalam pengawasan berkaitan dengan pembenahan hukum, peningkatan keterwakilan wanita di sektor keamanan, penghormatan HAM dan kebutuhan pelatihan keahlian gender. Advokasi yang berkaitan dengan pengawasan masyarakat sipil atas sektor keamanan dapat dan harus dijadikan sasaran pada berbagai tingkat. Kampanye advokasi dapat menggabungkan lobi langsung personel sektor keamanan tingkat tinggi, anggota parlemen, menteri atau lembaga donor dengan kegiatan advokasi seperti:

- Penyerahan proposal selama berlangsungnya konsultasi atau proses pengkajian ulang sektor keamanan.
- Prakarsa media
- Demonstrasi
- Debat kebijakan
- Perancangan rangkuman kebijakan

Masyarakat umum di sebagian besar negara umumnya cenderung tidak menyadari hak mereka sendiri atas keamanan dan keadilan atau kebijakan dan proses tertentu di sektor keamanan yang dirancang untuk menegakkan hak-hak ini. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu, mulai dari akses sistem peradilan dan pengajuan pengaduan kasus pelanggaran hukum oleh personel polisi, sampai bagaimana mempengaruhi kebijakan RSK dengan menghubungi para anggota parlemen, masyarakat juga dapat dilibatkan dalam meminta agar sektor keamanan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang efektif dan terhormat. Contoh tindakan yang dapat diambil OMS untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu gender dan sektor keamanan meliputi:

- Penyelenggaraan diskusi meja bundar atau seminar mengenai isu-isu gender dan kebijakan keamanan.
- Pembuatan bahan-bahan, seperti selebaran, mengenai bagaimana melaporkan pelanggaran HAM – termasuk GBV – oleh personel sektor keamanan.

Perlu diingat bahwa bukan hanya organisasi wanita yang dapat berperan dalam peningkatan kesadaran dan advokasi isu-isu gender dan keamanan. Peran para pria dan organisasi pria dalam pengawasan atas

Kotak 4 Tahap-tahap audit gender RSK¹⁹

1. Pengkajian ulang: Pengkajian ulang latar belakang merupakan titik mula penting untuk audit gender. Apabila terjadi proses RSK, pakar gender dari negara bersangkutan harus melakukan pengkajian ulang tersebut. Pengkajian ulang ini memberikan gambaran umum isu-isu gender yang relevan yang berkaitan bukan hanya dengan hubungan gender di negara audit tapi juga dengan fokus tertentu audit tersebut. Pengkajian ulang latar belakang ini mencakup informasi 'mendalam' yang kemudian biasanya dapat dijadikan rujukan pada audit yang lebih singkat.
2. Pengarahan dan kelompok fokus: Substansi audit gender disusun dari berbagai wawancara dan diskusi kelompok fokus. Wawancara mendalam dengan para aktor yang relevan pada bagian tertentu sektor keamanan yang dikaji ulang merupakan unsur penting dari pengumpulan informasi.
3. Pengkajian ulang dokumentasi: Pengkajian ulang dokumentasi melengkapi wawancara dan diskusi kelompok fokus dan dapat memberikan sumber informasi empiris yang penting dan terperinci serta landasan untuk triangulasi dengan sumber-sumber data lainnya. Tantangan dalam hal ini bisa berupa: akses atas dokumen-dokumen yang diperlukan; arsip yang tidak lengkap; pergantian staf dan perubahan nama proyek/program selama pelaksanaan atau perancangan ulang, terutama untuk program RSK yang digerakkan lembaga donor, yang menyulitkan pencarian dokumen yang relevan.
4. Distribusi hasil: Apabila audit gender sudah selesai, hasilnya perlu disebarakan kepada para pemangku kepentingan, terutama mereka yang terlibat di sektor yang sedang diaudit.

Kotak 5 Melibatkan pria dalam memberantas kekerasan terhadap wanita

Kampanye Pita Putih (WRC, White Ribbon Campaign) dimulai di Kanada pada tahun 1991 oleh sekelompok pria yang mengadvokasi pengakhiran kekerasan terhadap wanita dan berusaha memberikan informasi kepada para pria lain mengenai isu tersebut. Melalui kampanye peningkatan kesadaran, pernyataan publik, dan jaringan mereka yang terus berkembang, para anggota WRC memberikan visi alternatif pria sebagai orang yang tidak suka melakukan kekerasan dan memberikan model peran positif bagi para pria dan anak lelaki di dalam masyarakat di seluruh dunia. Walaupun mereka tidak berhubungan langsung dengan sektor keamanan, tindakan-tindakan seperti yang dilakukan oleh WRC berperan mengubah sikap dan budaya kekerasan yang mengekalkan kekerasan terhadap wanita, termasuk di kepolisian dan militer. WRC memberikan pendekatan inovatif dalam menangani akar agresi dan kekerasan di dalam keluarga dan masyarakat, dan merupakan cara yang efektif untuk menimbulkan perhatian, kesadaran dan pengakuan publik terhadap isu tersebut sambil menanggulangi peran dan hubungan gender yang tidak setara.²¹

Sumber daya lainnya untuk melibatkan pria dalam menangani kekerasan terhadap wanita:

- 'Elimination of Violence against Women in Partnership with Men' (*'Penghapusan Kekerasan terhadap Wanita Bermitra dengan Pria'*), Women in Development Section (*Wanita di Bagian Pembangunan*), ESCAP (*Komisi Ekonomik dan Sosial untuk Asia dan Pasifik PBB*), 2006.
- 'Men as partners: South African men respond to violence against women and HIV/AIDS' (*'Pria sebagai mitra: pria Afrika Selatan merespons kekerasan terhadap wanita dan HIV/AIDS'*), Dean Peacock, EngenderHealth, 2002.
- 'Ending Violence Against Women in Eastern Congo: Preparing Men to Advocate for Women's Rights' (*'Mengakhiri Kekerasan terhadap Wanita di Kongo Timur: Mempersiapkan Pria untuk Mengadvokasi Hak-hak Wanita'*), Women for Women International (*Wanita untuk Wanita Internasional*), 2007.

organisasi sektor keamanan dan advokasi isu-isu yang berkaitan dengan gender, khususnya GBV, sangat penting dan memberikan pesan kuat kepada para aktor sektor keamanan yang didominasi pria. Perubahan sikap, pola pikir dan praktik para pemangku kepentingan utama merupakan salah satu dari tujuan paling penting dari peningkatan kesadaran dan advokasi yang berkaitan dengan gender, dan ini dapat dilakukan dengan sangat efektif oleh para pria.

Untuk menjamin agar kampanye advokasi tanggap terhadap gender, OMS dapat memastikan agar materi dan bahasanya peka terhadap gender; agar kampanye tersebut bertujuan meningkatkan keamanan dan keadilan bagi para wanita dan anak perempuan serta para pria dan anak lelaki; bekerja sama dengan organisasi-organisasi wanita; dan menjamin tingkat keterlibatan wanita yang tinggi. OMS juga dapat mengadvokasi perubahan khusus yang berkaitan dengan gender di sektor keamanan yang meliputi:

- Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan dan rencana gender, termasuk kode perilaku, untuk lembaga-lembaga sektor keamanan.

- Pelatihan gender standar untuk polisi, angkatan bersenjata dan personel sektor keamanan lainnya.
- Pembentukan perundang-undangan yang diskriminatif agar cukup memadai mencegah, menangani dan menjatuhkan sanksi atas GBV.
- Perekrutan, retensi dan kemajuan lebih banyak wanita ke lembaga-lembaga sektor keamanan dan badan-badan pemerintah.
- Alokasi sumber daya keuangan, sumber daya manusia dan sumber daya material yang memadai untuk menangani ketidakamanan khusus yang dihadapi para wanita dan anak perempuan.
- Peningkatan pertanggungjawaban personel sektor keamanan atas pelanggaran HAM, termasuk GBV.

Tabel 1 Pertanyaan yang harus diajukan saat merencanakan kampanye advokasi	
<p>Apa isunya dan apa penyebabnya?</p>	<p>Gunakan penelitian mengenai kebijakan, anggaran dan sebagainya untuk mengidentifikasi masalah dan mendapatkan data yang nyata.</p>
<p>Apa maksud dan tujuan Anda?</p>	<p>Maksud merujuk pada sasaran jangka panjang kampanye, yang akan diwujudkan melalui kombinasi kegiatan advokasi dan kegiatan praktis. Tujuan adalah sasaran yang lebih segera dan harus nyata dan dapat diukur sebagai suatu hasil (bukan suatu kegiatan yang diusulkan). Contoh: 'Pada akhir tahun 2010 pemerintah akan membentuk suatu mekanisme konsultasi bagi OMS dalam penyusunan anggaran pertahanan yang peka terhadap gender.'</p>
<p>Apa perubahan nyata yang ingin Anda capai (misalnya, kesadaran, pengetahuan, sikap atau perubahan perilaku para pembuat kebijakan atau aktor sektor keamanan)?</p>	<p>Dengan kata lain, apa perbedaan yang dihasilkan dari advokasi tersebut?</p>
<p>Apa indikator yang akan digunakan untuk menelusuri kemajuan pencapaian hasil?</p>	<p>Pikirkan berbagai kemajuan yang ingin Anda telusuri selama penerapan strategi advokasi tersebut, misalnya prosesnya, dampak dan hasilnya, dan perubahan konteks usaha Anda.</p>
<p>Siapa pemangku kepentingan primer Anda? Bagaimana melibatkan mereka dalam merancang sasaran, tujuan, hasil dan indikator strategi Anda? Siapa pemangku kepentingan sekunder Anda dan pihak-pihak penting lainnya?</p>	<p>Pemangku kepentingan utama meliputi orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan perubahan tapi mungkin harus didorong untuk bertindak; pemangku kepentingan sekunder meliputi kelompok-kelompok yang dukungannya dapat digabungkan; pemangku kepentingan primer adalah pihak-pihak yang akan mendapatkan manfaat dari perubahan yang terjadi, dan pihak-pihak penting lainnya meliputi kelompok-kelompok sasaran di kalangan aktor keamanan yang mungkin menentang strategi tersebut. Memanfaatkan waktu untuk mempertimbangkan dengan matang bagaimana Anda akan bekerja sama dan mempengaruhi setiap pemangku kepentingan akan meningkatkan kesempatan keberhasilan.</p>
<p>Penelitian apa yang perlu Anda lakukan untuk menguji asumsi-asumsi mengenai pengetahuan, sikap, dll.?</p>	<p>Bagaimana Anda menjangkau sampel kelompok masyarakat sasaran yang representatif dan teknik apa yang akan Anda gunakan untuk mengetahui pandangan mereka mengenai isu-isu tersebut? Bagaimana mereka mendapatkan informasi mengenai topik tersebut?</p>
<p>Apa pesan utama yang perlu Anda komunikasikan dengan setiap kelompok pemangku kepentingan untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan (misalnya, meningkatkan pengetahuan mereka, mengubah praktik mereka)?</p>	<p>Gunakan kelompok-kelompok fokus bersama para praktisi media dan jenis-jenis penelitian media lainnya untuk memahami konteks dan sampaikan pesan-pesan Anda.</p>
<p>Apa jenis komunikasi (misalnya, versi populer temuan penelitian, lembar fakta), saluran (komunikasi bertatap muka, seminar, media) dan kegiatan yang paling cocok untuk pemangku kepentingan utama Anda?</p>	<p>Perjelas siapa yang menjadi sasaran Anda untuk melakukan apa; lakukan penelitian latar belakang mengenai kelompok-kelompok masyarakat dan sampaikan pesan-pesan yang sesuai kepada mereka. Pikirkan juga siapa yang berkomunikasi, libatkan orang-orang yang dipercaya/berpengaruh terhadap pemangku kepentingan utama.</p>
<p>Bagaimana jadwal/rencana kerja untuk strategi advokasi Anda? Apa tanggal/kesempatan utama untuk penyampaian pesan dan materi?</p>	<p>Siapkan jadwal saat merencanakan strategi Anda sehingga tenggat terpenuhi dan tugas-tugas terbagi secara efektif. Tetapkan tanggal kapan materi diterbitkan dan disebar.</p>
<p>Berapa dana yang perlu Anda anggarkan untuk strategi advokasi Anda dan apa keterampilan, materi dan keahlian yang diperlukan?</p>	<p>Sumber daya meliputi dana, materi, manusia dan keahlian mereka serta reputasi organisasi Anda (yaitu, modal sosial) sehubungan dengan topik tertentu yang Anda advokasikan.</p>
<p>Bagaimana Anda menilai dan menyebarkan dampak dari strategi Anda dan pelajaran yang diperoleh dari pengalaman Anda?</p>	<p>Pikirkan bagaimana kampanye advokasi di masa depan dan organisasi-organisasi lain dapat mendapatkan manfaat dari pengalaman Anda.</p>
<p>Bagaimana Anda menjamin keberlanjutan strategi advokasi Anda?</p>	<p>Apabila Anda berhasil mewujudkan perubahan, Anda perlu memikirkan bagaimana menjamin keberlanjutan perubahan tersebut. Apabila kampanye advokasi telah berfokus pada tingkat kebijakan, pelaksanaan kebijakan sangat perlu diperhatikan. Siapa yang akan melanjutkan intervensi tersebut? Apa pendekatan programatis yang paling efektif?</p>

Kiat bagi OMS yang merencanakan kegiatan advokasi dan peningkatan kesadaran

- Kampanye peningkatan kesadaran dengan sasaran masyarakat umum bisa menjadi bagian penting dari kampanye advokasi yang bertujuan mempengaruhi kebijakan dan program sektor keamanan.
- Rencanakan kampanye advokasi Anda dengan hati-hati. Identifikasi pemangku kepentingan dan sasaran utama untuk menyampaikan pesan-pesan Anda, termasuk para pembuat kebijakan utama yang berpengaruh di sektor keamanan, dan pastikan advokasi Anda didasarkan pada penelitian yang andal, menyeluruh dan peka terhadap gender.
- Manfaatkan peluang seperti pengkajian ulang kebijakan sektor keamanan atau pertahanan untuk memadukan isu gender ke dalam advokasi masyarakat sipil.
- Libatkan para pria dalam kampanye advokasi, khususnya para pria yang menangani kekerasan terhadap wanita.

4.6 Bekerja sama dengan media

Media memainkan peran sangat penting dalam mempromosikan pengawasan publik atas sektor keamanan dan dalam menyebarkan informasi mengenai reformasi pertahanan dan keamanan. OMS dapat bekerja sama dengan media untuk memperkuat kampanye peningkatan kesadaran dan advokasi mereka.

Para wartawan dan pihak lainnya yang bekerja di bidang media belum tentu mengenal aspek-aspek gender dari isu-isu keamanan atau memahami cara berbicara dan mendapatkan informasi dari para wanita. Selain itu, sedikit sekali panduan atau kebijakan gender di lembaga-lembaga media itu sendiri.²³ Karena itu, OMS dapat bekerja sama dengan media untuk melatih mereka mengenai bagaimana mengumpulkan informasi dan membuat laporan mengenai isu-isu keamanan dengan cara yang peka terhadap gender. Mungkin juga sulit bagi media untuk mengakses saksi atau korban perempuan dari pelanggaran HAM tertentu seperti pemerkosaan yang dilakukan personel pasukan keamanan, sehingga OMS juga dapat memainkan peran dalam memfa-

Kotak 6 Kiat bekerja sama dengan media untuk menghasilkan efek berganda²²

Pesan utama

- Identifikasi dan selesaikan 2-3 hal yang ingin Anda jelaskan.
- Selalu kembalikan wawancara/diskusi ke hal-hal ini.

Bicara dengan satu suara

- Apabila bekerja dalam koalisi, pastikan agar semua anggota memahami pesan-pesan yang dikomunikasikan kepada pers.
- Sebaiknya ditetapkan seorang juru bicara.

Hubungi pers secara langsung

- Lakukan langkah proaktif – jangan hanya merespons isu-isu yang sudah menjadi berita, tapi berikan berita dan siaran pers.
- Tulis surat kepada editor untuk memancing perdebatan – surat tersebut harus singkat dan langsung ke pokok persoalan.

Berikan informasi yang mudah dipahami

- Berikan informasi tertulis yang singkat dan jelas – misalnya, paket informasi atau pengarahan pers. Ini bisa meliputi informasi kontak, informasi mengenai isu yang diadvokasi, latar belakang isu, informasi mengenai pandangan yang bertentangan, fakta dan data statistik.

Pengarahan/siaran pers

- Ketahui tenggat dan waktu paling tepat untuk menghubungi pers.
- Siapkan paket pers pada semua kegiatan.
- Berikan pengarahan latar belakang sehingga para wartawan dapat melakukan penyelidikan sendiri.

Jadilah narasumber yang terpercaya

- Jadilah narasumber yang terpercaya sehingga pers datang menemui Anda dan organisasi Anda untuk mendapatkan informasi resmi mengenai berbagai aspek sektor keamanan. Keterpercayaan saat berhubungan dengan para aktor sektor keamanan sangat berkaitan dengan tingkat keahlian teknis.
- Undang media hanya apabila ada hal penting yang ingin Anda sampaikan.
- Apabila Anda menggunakan data statistik, pastikan data tersebut andal.

Tampil di TV dan radio

- Tetap fokus pada pesan-pesan utama.
- Adakan pelatihan teknik wawancara.

Evaluasi kampanye Anda

- Catat dan evaluasi liputan pers serta belajarlah dari kampanye sebelumnya.

Kotak 7 Pembuatan laporan media yang tanggap terhadap gender ²⁴

Dalam mengkomunikasikan gender para wartawan harus menyadari bahwa masyarakat bisa terpinggirkan karena gender mereka.

Karena itu, kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti:

- Siapa yang diliput?
- Dari perspektif apa?
- Melalui lensa mana?
- Mencerminkan stereotipe masyarakat yang mana?
- Apakah berita tersebut membantu memajukan kesetaraan dan kesamaan gender dalam masyarakat atau apakah berita tersebut disampaikan dengan cara yang mendukung sikap dan nilai-nilai tradisional?
- Apakah masalah wanita atau pria dipisahkan dari masalah masyarakat secara umum?

silitasi proses ini dan dalam menyediakan pelayanan dan bantuan yang diperlukan kepada korban yang mau mempublikasikan kisah mereka.

Kiat bagi OMS agar lebih efektif memanfaatkan media

- Manfaatkan media untuk menyebarkan pesan-pesan advokasi Anda kepada masyarakat sasaran yang luas. Adakan kerja sama dengan surat kabar kecil, stasiun radio masyarakat dan stasiun televisi lokal, serta gerai media pemerintah.
- Jadikan peka dan berikan pelatihan kepada para wartawan dan pihak-pihak lainnya yang bekerja di bidang media mengenai aspek-aspek gender dari sektor keamanan dan penggunaan bahasa yang peka terhadap gender (lihat Kotak 7).

membangun kemampuan personel sektor keamanan melaksanakan tugas mereka sehari-hari dengan cara yang tanggap terhadap gender. Kemampuan gender merupakan keahlian sebagaimana keahlian lain, dan karena itu harus dipelajari. Pelatihan bisa menjadi cara yang sangat efektif untuk mengubah sikap dan perilaku staf sektor keamanan dan merupakan unsur penting dalam meningkatkan pengawasan terhadap sektor keamanan. Pelatihan gender juga dapat digunakan sebagai proses untuk meningkatkan saling pengertian dan memfasilitasi kerja sama di masa depan antara OMS dan personel sektor keamanan. Pelatihan gender tidak selalu dimasukkan sebagai bagian dari metode pelatihan standar militer, polisi atau agen keamanan swasta, atau dalam pelatihan pengawasan sektor keamanan yang ditujukan pada para aktor lainnya seperti anggota parlemen, staf kementerian pertahanan atau LSM. Apabila tersedia pelatihan seperti ini, pelatihan tersebut biasanya tidak seragam, wajib atau menyeluruh.

4.7 Pelatihan gender bagi personel sektor keamanan

Pelatihan gender merupakan strategi utama untuk

Lihat Tool mengenai Pelatihan Gender bagi Personel Sektor Keamanan

Kotak 8 Mongolia – pemasukan pendidikan kesehatan seksual dalam kurikulum pelatihan militer ²⁵

Mongol Vision (Visi Mongol), sebuah LSM yang didirikan pada tahun 1998, berusaha melaksanakan berbagai kegiatan di bidang kesehatan reproduksi, termasuk pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS dan infeksi menular seksual (IMS) lainnya. Mongol Vision memfokuskan kegiatannya pada para pria, termasuk para perwira dan prajurit angkatan bersenjata Mongolia. Kegiatan ini dipimpin oleh panitia pengarah kebijakan kesehatan masyarakat Mongol Vision, yang meliputi Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Mongolia.

Isu: Anggota baru Angkatan Bersenjata Mongolia, terutama yang berasal dari daerah pedesaan, memiliki sedikit atau tidak memiliki pengetahuan mengenai HIV/AIDS dan IMS. Karena itu, tingkat IMS relatif tinggi di kalangan perwira dan prajurit.

Tujuan: Mendapatkan dukungan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Mongolia untuk meningkatkan kesadaran mengenai HIV/AIDS, IMS dan kesehatan reproduksi di kalangan perwira dan prajurit.

Pemangku kepentingan utama: Kementerian Pertahanan dan markas besar Angkatan Bersenjata Mongolia.

Pemangku kepentingan primer: Prajurit/perwira dan pasangan seks mereka.

Pendekatan dan komunikasi: Surat-surat dikirim kepada Kementerian Pertahanan dan markas besar angkatan bersenjata; pertemuan resmi dan tak resmi diadakan dengan para pejabat tingkat tinggi; sebuah proyek disiapkan bekerja sama dengan para pejabat tingkat tinggi; sebuah lokakarya diselenggarakan bersama para pejabat tingkat tinggi; para perwira komando dan dokter satuan militer menyajikan laporan mengenai situasi STI saat ini di kalangan personel angkatan bersenjata.

Indikator keberhasilan dan keberlanjutan: Kesehatan seksual dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan resmi untuk staf militer; peningkatan kesadaran para perwira tingkat tinggi; peningkatan dukungan dari Kementerian Pertahanan; perluasan basis kegiatan Mongol Vision.

Kotak 9 Sumber daya pelatihan gender ²⁷

Inspirasi pelatihan yang relevan dapat ditemukan pada toolkit pelatihan gender berikut:

- **Inclusive Security, Sustainable Peace: A Toolkit for Advocacy and Action (Keamanan Inklusif, Perdamaian Berkelanjutan: Toolkit untuk Advokasi dan Tindakan)** – terdiri dari alat-alat yang ditujukan pada para wanita mengenai isu keamanan, peradilan, tata pemerintahan dan masyarakat sipil, perlindungan kelompok masyarakat yang rentan, dll.
http://www.international-alert.org/our_work/themes/gender_training.php
- **Toolkit for Working with Men and Boys to Prevent Gender-Based Violence (Toolkit mengenai Kerja Sama dengan Pria dan Anak Lelaki untuk Mencegah Kekerasan Berbasis Gender)** – terdiri dari bacaan, studi kasus, selebaran dan latihan.
<http://toolkit.endabuse.org>
- **Toolkit to Combat Trafficking in Persons (Toolkit mengenai Pemberantasan Perdagangan Manusia)** – terdiri dari alat-alat mengenai hukum internasional, penilaian, perlindungan, pendidikan masyarakat, pemantauan dan evaluasi, dll.
http://www.unodc.org/pdf/Trafficking_toolkit_Oct06.pdf
- **Gender Resource Package for Peacekeeping Operations (Paket Sumber Daya Gender untuk Operasi Pemeliharaan Perdamaian)** – terdiri dari informasi latar belakang, sorotan isu-isu utama gender, dan tools (alat-alat) praktis.
<http://pbpu.unlb.org/pbpu/genderpack.aspx>

Organisasi-organisasi wanita mungkin memiliki keahlian khusus mengenai isu gender dan berpengalaman memberikan pelatihan gender dan dengan demikian dapat memberikan atau menawarkan masukan untuk modul pelatihan yang ada untuk personel sektor keamanan, atau dalam menyusun modul pelatihan khusus mengenai isu gender dan keamanan, khususnya mengenai eksploitasi dan penganiayaan seksual. Selain bekerja sama mengadakan pelatihan gender, OMS yang memiliki keahlian dalam isu gender dapat:

- Menyusun kurikulum standar pelatihan gender untuk lembaga-lembaga sektor keamanan yang berbeda, seperti pelatihan mengenai kekerasan dalam rumah tangga untuk personel polisi, yang dapat disesuaikan dan digunakan oleh para pelatih.
- Melakukan lobi untuk pembuatan kebijakan yang mewajibkan pelatihan gender yang menyeluruh bagi personel sektor keamanan.
- Mengadvokasi dan berpartisipasi dalam pembuatan panduan, manual dan buku pedoman gender yang berfungsi sebagai sumber daya praktis bagi personel sektor keamanan.
- Melakukan lobi untuk pembuatan jabatan gender di lembaga-lembaga sektor keamanan untuk mengoordinasikan, melaksanakan dan memantau pelatihan gender.²⁶

Dalam sebuah diskusi online baru-baru ini yang melibatkan lebih dari 140 pembuat kebijakan dan praktisi, 10 rekomendasi pokok di bidang pelatihan gender bagi personel sektor keamanan dihasilkan:

1. Perhatikan peran dan norma tradisional pria.
2. Libatkan pria sebagai pelatih gender.
3. Prioritaskan pelatihan bagi para manajer dan pejabat senior.
4. Padukan gender ke dalam pelatihan berkala sektor keamanan.
5. Laksanakan pelatihan sebagai bagian dari strategi pengarusutamaan gender yang lebih luas.
6. Susun rencana aksi atau kebijakan institusi yang

mencakup pelatihan gender.

7. Selenggarakan pelatihan pra-penugasan bagi personel pemeliharaan perdamaian.
8. Manfaatkan kerja sama antara OMS dan lembaga-lembaga sektor keamanan.
9. Pastikan penggunaan bahasa yang sadar gender.
10. Lakukan evaluasi jangka panjang dan identifikasi beberapa indikator.²⁹

! Kiat bagi OMS yang terlibat dalam pelatihan personel sektor keamanan

- Lakukan penilaian kebutuhan pelatihan untuk mengidentifikasi kesenjangan pada pelatihan yang ada dan bidang-bidang yang perlu diperbaiki.
- Prakarsai atau ikutlah berperan dalam penyusunan modul pelatihan gender standar bagi para anggota baru dan para personel kepolisian dan angkatan bersenjata yang sudah lama bertugas.
- Buat daftar pelatih masyarakat sipil yang memenuhi syarat di negara yang membutuhkan yang dapat memberikan pelatihan gender kepada personel sektor keamanan.
- Gunakan kesempatan pelatihan sebagai landasan untuk meningkatkan hubungan dan kemitraan dengan para pejabat pemerintah, angkatan bersenjata dan kepolisian.
- Jangan 'reinvent the wheel' (membuat segalanya dari nol): gunakan dan kembangkan modul pelatihan gender yang ada.

4.8 Organisasi wanita

Agar pengawasan inklusif dan cukup mewakili masyarakat, organisasi-organisasi wanita harus terlibat dalam usaha pengawasan masyarakat sipil. Isu keamanan sering dianggap sebagai 'bidang pria'. Namun demikian, sebagaimana telah dibahas pada Bagian 3.3, organisasi-organisasi wanita sering

memainkan peran penting yang dapat dimanfaatkan oleh badan-badan pengawasan secara lebih efektif. Mengingat keanggotaan dan prioritasnya yang berbeda, organisasi-organisasi wanita dapat memberikan sumbangan penting terhadap proses pengawasan:

- OMS yang menangani isu gender merupakan narasumber pakar untuk berbagai jenis ketidakamanan yang dialami pria dan wanita.
- Organisasi wanita sering dapat menjangkau kelompok masyarakat yang berbeda, terutama para wanita atau kelompok masyarakat terpinggirkan lainnya, dan dengan demikian dapat mengumpulkan informasi yang mungkin terabaikan.
- Organisasi wanita dapat memberikan perspektif gender untuk mempengaruhi kebijakan dan praktik sektor keamanan.
- Organisasi wanita mungkin sangat memperhatikan standar perilaku dan tindakan yang menangani pelanggaran hukum berat terhadap wanita seperti pemerkosaan atau pelecehan yang dilakukan oleh personel sektor keamanan.

Namun demikian, perlu juga diketahui bahwa semua organisasi wanita belum tentu mewakili secara efektif kebutuhan berbagai kelompok wanita dan mungkin tidak selalu memiliki keahlian khusus mengenai isu gender.

Tanpa melibatkan sepenuhnya organisasi-organisasi wanita dalam proses pengawasan, masyarakat sipil tidak akan mendapatkan manfaat dari berbagai keahlian yang tersedia atau memanfaatkan semua titik mula bagi pemantauan dan analisis yang efektif. Namun demikian, kemampuan organisasi wanita untuk berpartisipasi secara efektif dalam pengawasan sektor keamanan juga berkaitan dengan kemampuan mereka. Terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan dan memperbaiki 'literasi keamanan'

masyarakat sipil, termasuk organisasi wanita. Pembangunan kemampuan untuk meningkatkan 'literasi keamanan' bisa berupa pelatihan khusus untuk organisasi wanita di bidang-bidang seperti:

- Terminologi dan teori dasar pengawasan sektor keamanan
- Kebijakan sektor keamanan
- Kerangka dan standar kebijakan internasional yang berkaitan dengan isu gender dan keamanan dan bagaimana kerangka dan standar tersebut dapat digunakan sebagai instrumen advokasi
- Lembaga-lembaga sektor keamanan, tugas dan prosedur pembuatan keputusan mereka
- Isu gender dan RSK/pengawasan
- Penyusunan anggaran yang peka terhadap gender untuk sektor keamanan
- Penilaian dampak gender³³

Organisasi-organisasi wanita atau OMS lainnya perlu menetapkan diri mereka sebagai 'pakar' untuk memperkuat hubungan aktif dengan para aktor sektor keamanan. Apabila OMS yang menangani isu yang berkaitan dengan gender memiliki kemampuan memberikan bantuan teknis, mereka menjadi mitra berharga bagi badan-badan pengawasan sektor keamanan serta untuk lembaga-lembaga negara yang ingin melakukan reformasi keamanan dan keadilan. Begitu pula, terdapat juga kebutuhan untuk meningkatkan 'literasi gender' OMS secara umum. Kurangnya perhatian pada isu gender berarti OMS tidak mungkin membahas dimensi gender dari RSK atau tidak mungkin memiliki kemampuan dan keahlian untuk memadukan gender ke dalam keterlibatan masyarakat sipil dalam mekanisme pengawasan yang ada (lihat Bagian 4.9 mengenai OMS yang tanggap terhadap gender). Begitu pula, hal ini dapat membatasi sampai sejauh mana OMS memahami

Kotak 10 Rencana Aksi Inggris atas Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 dan pelatihan gender bagi angkatan bersenjata

Pada bulan Maret 2006, Pemerintah Inggris mengumumkan rencana aksi nasional atas pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325. Dalam menyusun rencana tersebut, Kelompok Lintas Departemen tentang 1325 (Cross-Whitehall Group on 1325) yang terdiri dari para wakil dari Departemen Luar Negeri dan Persemakmuran, Kementerian Pertahanan dan Departemen Pembangunan Internasional, mengadakan konsultasi dengan Aksi Gender untuk Perdamaian dan Keamanan (GAPS, Gender Action for Peace and Security), sebuah jaringan aktor masyarakat sipil yang berkedudukan di Inggris yang berfokus pada penanganan isu-isu wanita, perdamaian dan keamanan.

GAPS bermula dari Kelompok Kerja untuk Wanita, Perdamaian dan Keamanan Inggris (UK Working Group on Women, Peace and Security) dan pertama kali dibentuk pada pertengahan tahun 2004 oleh Kewaspadaan Internasional (International Alert) untuk meningkatkan kesadaran mengenai isu gender dan keamanan dan mendukung serta memantau pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 oleh Pemerintah Inggris. Didirikan secara resmi pada bulan Juni 2005, GAPS sekarang memiliki empat belas organisasi dan individu sebagai anggotanya.²⁸ GAPS diberi kesempatan untuk memberikan masukan terhadap prioritas rencana aksi nasional, dan konsultasi berkelanjutan dengan masyarakat sipil dijadikan sebagai salah satu tujuan dari rencana itu sendiri.

Pelatihan gender diidentifikasi sebagai suatu kebutuhan utama, dan setelah pengumuman rencana tersebut pemerintah mengambil langkah-langkah untuk memetakan penyediaan pelatihan gender bagi tentara Inggris dan mengidentifikasi cara-cara untuk memperbaikinya. Selain itu, GAPS bersama dengan para anggota parlemen berpengaruh dan Cross-Whitehall Group on 1325, membentuk Kelompok Mitra Parlemen untuk Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 (APG, Associate Parliamentary Group on SCR 1325), yang merupakan salah satu dari beberapa kelompok di Inggris yang mengizinkan masyarakat sipil dan pegawai negeri bekerja sama dengan anggota parlemen. GAPS mendesak pembentukan sub-kelompok untuk pelatihan gender, dan kelompok ini sekarang mendukung Kementerian Pertahanan dalam usaha meningkatkan penyediaan pelatihan gender dan mengumpulkan informasi dan penelitian mengenai dampak dari pelatihan gender ini. Walaupun belum ada data yang tersedia, kelompok ini bisa menjadi model yang sangat berguna bagi pelatihan gender untuk personel militer di negara-negara lain.

Kotak 11 Organisasi wanita yang melakukan lobi mendukung pembenahan demokratis atas sektor keamanan di Irak, Rusia dan Afrika Barat

Serikat Komite Ibu Prajurit (Union of the Committees of Solider's Mothers) Rusia dibentuk dengan tujuan menarik perhatian terhadap pelanggaran HAM di militer Rusia dan mengadvokasi perbaikan mekanisme perlindungan dan kesejahteraan prajurit, terutama dalam perang Chechnya. Para anggota Serikat tersebut juga mengadakan kampanye publik menentang wajib militer dan mendukung amnesti bagi para prajurit. Organisasi ini telah berhasil dalam sebagian dari usahanya mempengaruhi kebijakan militer di Rusia dan mendapatkan kebebasan serta perlindungan bagi banyak pewartu militer.³⁰

Dalam konteks pasca-konflik, organisasi wanita sering berkumpul di tingkat nasional untuk mengidentifikasi prioritas utama mereka di bidang keamanan, politik, ekonomi dan sosial. Misalnya, pada tahun 2003 dalam sebuah konferensi yang diselenggarakan di Washington DC, para wanita dari Irak, termasuk para wakil dari organisasi-organisasi masyarakat sipil, para menteri pemerintahan dan personel sektor keamanan, mengidentifikasi sejumlah bidang utama seperti peningkatan keamanan perbatasan, peningkatan jumlah polisi di seluruh negara, perbaikan penerangan jalan, dan pelatihan mengenai isu gender dan HAM bagi para perwira polisi dan angkatan bersenjata sebagai bidang penting bagi keamanan mereka dan keberhasilan proses RSK di negara mereka.³¹ Informasi ini merupakan sumber daya berharga bagi para pembuat kebijakan keamanan dan badan pengawasan, dan berbagai usaha harus dilakukan untuk menjamin agar rekomendasi organisasi wanita dimasukkan dalam pengkajian ulang dan pembuatan kebijakan keamanan.

Bermitra dengan Jaringan Keamanan dan Tata Pemerintahan Demokratis Afrika Barat (West Africa Network for Security and Democratic Governance) dan Friedrich Ebert Stiftung, Wanita dalam Jaringan Pembangunan Perdamaian (WIPNET, Women in Peacebuilding Network) di Afrika Barat merancang metodologi khusus untuk pengarusutamaan gender dan khususnya isu-isu wanita dalam reformasi sektor keamanan. Sebagai kegiatan lanjutan, WIPNET diharapkan akan memberikan pelatihan kepada para pakar dan kelompok-kelompok wanita mengenai 'Gender dan Reformasi Sektor Keamanan' ('Gender and Security Sector Reform').³²

sumbangan penting yang dapat diberikan organisasi wanita terhadap usaha mereka.

Membuat forum atau membangun koalisi yang menghubungkan OMS dengan departemen pemerintahan yang terkait untuk menyusun strategi untuk meningkatkan pertanggungjawaban dan efektivitas sektor keamanan sehubungan dengan isu gender bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan ini. Di Inggris, para anggota Aksi Gender untuk Perdamaian dan Keamanan (Gender Action for Peace and Security) telah menyediakan pelatihan dan nasihat pakar kepada Kementerian Pertahanan Inggris, akademi pelatihan pertahanan/militer dan organisasi-organisasi regional. Di Sierra Leone, OMS lokal dan internasional di beberapa kabupaten telah bermitra secara efektif dengan para pejabat kesehatan kabupaten, Satuan Dukungan Keluarga (Family Support Unit) kepolisian dan sektor peradilan untuk menjamin agar para korban kekerasan dalam rumah tangga mendapat layanan medis dan psikologis yang memadai dan kejahatan ditindaklanjuti, dilaporkan dan dituntut.³⁴ Ini juga dapat membantu membangun transparansi dan kepercayaan di antara OMS dan lembaga-lembaga sektor keamanan.

Kiat untuk melibatkan organisasi wanita dalam pengawasan sektor keamanan

- Teliti kegiatan informal organisasi-organisasi wanita yang berkaitan dengan penyediaan keamanan dan/atau advokasi di sektor keamanan dan libatkan mereka dalam mekanisme pengawasan.
- Berikan pelatihan 'literasi gender' kepada organisasi-organisasi wanita agar mereka mampu menangani isu-isu keamanan secara lebih efektif bersama masyarakat sipil, pemerintah dan

pemangku kepentingan lainnya.

- Buat mekanisme untuk menghubungkan organisasi-organisasi wanita dengan departemen-departemen pemerintahan untuk memperkuat akses dan pengaruh mereka terhadap perdebatan mengenai kebijakan yang berkaitan dengan keamanan.

4.9 Jaringan masyarakat sipil

Umumnya, OMS lebih berpengaruh apabila berbicara dengan satu suara. Jaringan memberikan kekuatan dalam jumlah dan dapat membantu melindungi setiap OMS dari menjadi target penyalahgunaan dan tekanan politik. Salah satu fungsi utama mereka adalah menunjukkan dukungan terhadap pembenahan dari berbagai kelompok dalam masyarakat.

Ini terlihat jelas ketika Kelompok Kerja LSM untuk Wanita, Perdamaian dan Keamanan (NGO Working Group on Women, Peace and Security) dibentuk pada bulan Mei 2000 oleh 11 organisasi untuk mengadvokasi persetujuan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 mengenai wanita, perdamaian dan keamanan internasional. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 tersebut disetujui secara bulat pada tanggal 31 Oktober 2000. Sejak saat itu, fokus Kelompok Kerja LSM mulai beralih ke usaha mendukung pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325, mempromosikan perspektif gender dan penghormatan HAM dalam semua prakarsa perdamaian dan keamanan, pencegahan dan penanganan konflik, dan pembangunan perdamaian PBB dan negara-negara anggotanya.

Kotak 12 Bermitra dengan lembaga-lembaga keamanan di Bougainville untuk mencegah kekerasan³⁵

Kelompok-kelompok wanita di Bougainville, Papua Nugini, memainkan peran penting dalam mengakhiri konflik, baik secara langsung dengan mengadakan perundingan dengan para pihak yang bertikai maupun dengan mendukung reintegrasi para mantan kombatan dan pendidikan di dalam masyarakat mereka. Jelasnya, mereka telah bekerja sama secara khusus dengan sektor keamanan dalam beberapa prakarsa:

- Para wanita telah memberikan pelatihan dan pemekaan mengenai hak-hak wanita kepada para mantan kombatan. Hal ini telah memberikan hasil langsung berupa penurunan tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh para pria ini.
- Kelompok-kelompok wanita merekrut dan melatih para pria untuk mendidik para mantan kombatan mengenai hak-hak wanita, HIV/AIDS dan penyelesaian konflik di sekolah-sekolah dan desa-desa.
- Badan Pengembangan Wanita Leitana Nehan (Leitana Nehan Women's Development Agency) memberikan pelatihan gender bagi personel polisi baru bekerja sama dengan kepolisian dan juga menyelenggarakan lokakarya peningkatan kesadaran untuk menyoroti dampak negatif dari kekerasan terhadap wanita dan anak-anak di dalam berbagai masyarakat.

Di banyak negara, mungkin sulit bagi OMS untuk terlibat secara langsung menangani isu-isu keamanan dan keadilan dan penyusunan kebijakan keamanan pada tingkat nasional karena lingkungan politik yang tertutup atau bahkan bermusuhan. Partisipasi dalam diskusi dan mekanisme yang berkaitan dengan keamanan pada tingkat regional bisa menjadi cara yang efektif untuk melakukan tekanan terhadap para pembuat kebijakan pada tingkat nasional. Setiap OMS biasanya dianggap memiliki kredibilitas apabila mereka menjadi anggota jaringan regional atau internasional atau memiliki mitra internasional. Dukungan ini dapat digunakan sebagai landasan untuk hubungan nasional dengan pemerintah dalam penyusunan kebijakan keamanan.

Pembangunan jaringan seperti ini dapat dilakukan melalui dialog baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional. Melalui partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam serangkaian lokakarya, pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan keamanan tertentu dapat dibentuk. Begitu pula, jaringan kelompok-kelompok masyarakat yang tertarik mendukung perubahan progresif dapat dibentuk. Karena kebijakan keamanan nasional berusaha mencakup kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, dan terutama saat menangani isu gender, legitimasi jaringan tersebut akan meningkat sejalan dengan:

- Keanekaragaman kelompok/organisasi yang terwakili dalam jaringan tersebut. Kelompok-kelompok ini harus dicari dan didekati secara terencana.
- Penyusunan prinsip-prinsip umum jaringan tersebut untuk menghindari tumpang tindih dengan bidang kerja setiap anggota.
- Pengetahuan khusus mengenai bagaimana cara kerja sektor keamanan, proses pembuatan kebijakan dan bagaimana gender terwakili dalam jaringan sebagai panduan strategis.
- Ketersediaan pengetahuan khusus dalam jaringan tersebut yang dapat dimanfaatkan oleh para pembuat kebijakan.
- Keterwakilan para pakar dan individu yang sangat dihormati di kalangan pembuat kebijakan.

4.10 OMS yang tanggap terhadap gender

OMS yang terlibat dalam pengawasan sektor keamanan juga berkewajiban merevisi kebijakan dan praktik internal sehingga kebijakan dan praktik tersebut mencerminkan idéal kesetaraan gender. Ini perlu untuk menjamin agar kebijakan dan praktik tersebut benar-benar representatif dan partisipatif, dan juga untuk meningkatkan efektivitas OMS secara keseluruhan.

Namun demikian, sebagian besar organisasi masyarakat sipil kekurangan keseimbangan gender dan para anggota stafnya mungkin tidak memiliki keahlian dan kemampuan yang diperlukan untuk memadukan isu gender secara efektif ke dalam pekerjaan mereka. Untuk memperbaiki situasi ini, harus dilakukan usaha-usaha untuk menerapkan perekrutan, promosi dan kebijakan sumber daya manusia yang tanggap terhadap gender, dan mekanisme khusus harus diterapkan untuk mencegah diskriminasi atau pelecehan seksual di tempat kerja. Kode perilaku, kebijakan dan panduan internal adalah salah satu cara untuk menjamin agar standar ini terpenuhi (lihat Kotak 13). Mengaitkan kriteria yang berkaitan dengan gender dengan evaluasi kinerja juga dapat meningkatkan pertanggungjawaban setiap anggota staf untuk menangani isu gender dalam pekerjaan mereka. OMS yang menangani pengawasan sektor keamanan dapat meningkatkan usaha mereka untuk menarik, mengangkat dan mempertahankan staf perempuan melalui perbaikan kebijakan perekrutan dan keseimbangan kehidupan kerja.

Gender juga perlu diarusutamakan ke dalam semua kebijakan dan program institusi OMS yang menangani isu keamanan. Untuk melakukan ini, pendanaan yang memadai untuk pekerjaan yang berkaitan dengan gender dan keahlian serta kemampuan internal sangat penting. Selain itu, pelatihan khusus juga harus diberikan kepada semua anggota staf untuk menjamin agar mereka memiliki kemampuan dan keahlian teknis untuk melaksanakan pekerjaan yang spesifik gender. Melakukan audit gender internal dan mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu perbaikan juga menjadi langkah penting dalam mengidentifikasi cara memperkuat pengarusutamaan gender.³⁶

Kiat agar OMS lebih tanggap terhadap gender

- Susun kebijakan gender dan kesetaraan peluang yang menyeluruh yang mencakup isu sumber daya manusia, persyaratan prestasi kerja dan pelecehan serta diskriminasi seksual, termasuk kode perilaku.
- Evaluasi uraian tugas dan persyaratan kerja untuk menjamin agar uraian dan persyaratan tersebut tidak mendiskriminasi wanita atau pria.
- Berikan pelatihan gender kepada semua anggota staf dan sukarelawan.
- Lakukan audit gender internal untuk menilai kemampuan organisasi.
- Lembaga-lembaga donor yang mendukung keterlibatan OMS dalam pengawasan sektor keamanan dapat meminta agar OMS tanggap terhadap gender.

5 Memadukan gender ke dalam pengawasan sektor keamanan dalam konteks khusus

Tidak ada model tunggal untuk pengawasan sektor keamanan karena pengawasan tersebut merupakan suatu proses yang harus terjadi pada tingkat yang berbeda dan bervariasi antardaerah dan konteks.

5.1 Negara-negara pasca-konflik

Wanita dan anak perempuan sangat rentan terhadap kenaikan tingkat ketidakamanan selama konflik akibat pelanggaran seksual dan GBV. Kerentanan ini dapat dan memang sering berlanjut menyusul konflik. Personel sektor keamanan mungkin telah melakukan pelanggaran HAM berat dan mungkin terus melakukan pelanggaran di masa damai. Selain itu, lembaga keamanan dan keadilan yang didukung negara mungkin sudah runtuh di daerah tertentu atau kehilangan legitimasi karena peran yang mereka mainkan selama konflik berlangsung.

Bukti-bukti menunjukkan bahwa peran dan hubungan gender juga sering berubah selama dan setelah konflik, yang dapat membuka ruang penting untuk merundingkan perubahan. Misalnya, menyusul berakhirnya konflik dan pemilihan presiden perempuan pertama di Afrika, Liberia mengesahkan perundang-undangan baru yang keras berupa 'undang-undang pemerkosaan' yang berlaku pada bulan Februari 2006. Organisasi-organisasi wanita seperti Perhimpunan Pengacara Wanita Liberia (Association of Female Lawyers of Liberia) memainkan peran penting dalam merancang undang-undang baru tersebut dan meningkatkan kesadaran mengenai undang-undang tersebut di dalam masyarakat di seluruh Liberia.³⁸ Namun demikian, sebaliknya, perubahan peran dan hubungan ini juga bisa menimbulkan ancaman baru, penurunan kemampuan menangani ketidakamanan yang ada, atau pengurangan peran-peran tradisional menyusul berakhirnya konflik.³⁹

Selanjutnya, undang-undang, struktur dan mekanisme untuk melindungi para wanita dan anak perempuan dari berbagai ancaman keamanan jarang tersedia atau berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga mengurangi sumber daya yang tersedia untuk menjamin perlindungan para wanita dan anak perempuan.

Kotak 13 Kebijakan gender Oxfam³⁷

Oxfam telah mencapai kemajuan signifikan dalam mengembangkan pendekatannya terhadap pengarusutamaan gender dalam pekerjaan organisasi tersebut, dan juga dalam praktik-praktik internalnya. Selain kebijakan Kesetaraan Peluang dan Keanekaragaman (Equal Opportunity and Diversity), Oxfam telah menyusun kebijakan gender yang menguraikan komitmen-komitmen tertentu organisasi tersebut dan para anggota stafnya. Dengan demikian, kebijakan ini dapat digunakan untuk menjamin pertanggungjawaban, transparansi dan keterwakilan setara serta berfungsi sebagai pedoman untuk memantau sampai sejauh mana organisasi tersebut berhasil dalam mengarusutamakan gender dalam pekerjaannya. Walaupun Oxfam tidak secara khusus menangani isu-isu keamanan, organisasi ini menjadi contoh berguna yang dapat diikuti oleh OMS yang menangani pengawasan sektor keamanan. Beberapa ketentuan dari kebijakan gender tersebut adalah:

- Para manajer akan mendorong kelompok-kelompok dan forum-forum di seluruh organisasi tersebut untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik mengenai kesetaraan gender. Pelatihan gender juga akan diberikan bagi staf dan sukarelawan.
- Dalam semua pekerjaan kami, kami akan menunjukkan komitmen terhadap kesetaraan gender dengan menetapkan tim dan tujuan perorangan yang sesuai dan dengan mengalokasikan staf dan sumber daya yang memadai agar kami dapat melaksanakan kebijakan kesetaraan gender tersebut.
- Para manajer semua bagian akan memikirkan dan melaporkan tujuan dan tindakan yang dapat diukur yang berkaitan dengan kebijakan kesetaraan gender; dan pimpinan kami, sistem keuangan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia akan memfasilitasi dan mendukung pekerjaan gender kami.
- Kesadaran dan pemahaman gender akan digunakan sebagai kriteria perekrutan dan pembinaan staf dan sukarelawan.
- Di dalam organisasi ini kami akan menerapkan praktik-praktik kerja yang ramah keluarga yang memungkinkan pria maupun wanita berpartisipasi penuh dalam pekerjaan dan kehidupan keluarga.

Kemampuan lembaga-lembaga negara sering begitu lemah sehingga walaupun ada kemauan politik, alat-alat untuk menyediakan layanan keamanan dan keadilan tidak tersedia dalam pengertian sumber daya teknis, sumber daya finansial atau sumber daya manusia. Pada saat yang sama sebagai tantangan, perlu diingat bahwa RSK yang terjadi setelah konflik juga bisa menjadi kesempatan untuk membantu meningkatkan kesetaraan dan inklusivitas gender dalam struktur dan proses sektor tersebut.

OMS mungkin jadi terpecah atau lemah selama konflik dan akibatnya tidak memiliki jangkauan, legitimasi atau kemampuan untuk melaksanakan tugas pengawasan mereka secara efektif. Dalam kasus lain, kerja sama OMS bisa meningkat pada masa pasca-konflik karena ketidakamanan serta reformasi angkatan bersenjata dan kepolisian menjadi masalah utama banyak organisasi, sehingga memberi OMS kesempatan untuk bekerja sama.

! Peluang dan kiat pemaduan isu gender

- GBV sering digunakan sebagai strategi selama konflik, dan jumlah kasusnya mungkin meningkat menyusul konflik. Pengawasan atas bagaimana para aktor sektor keamanan menangani GBV dalam pekerjaan mereka sehari-hari sangat penting, begitu pula dengan pemantauan atas personel kepolisian dan angkatan bersenjata untuk menjamin agar mereka tidak terlibat sebagai pelaku GBV.
- Asalkan cocok, padukan rekomendasi yang berkaitan dengan gender yang dibuat dalam konsultasi tingkat lokal atau nasional ke dalam advokasi yang lebih luas mengenai isu keamanan.
- Promosikan debat publik tingkat nasional dan lokal untuk menjamin agar apabila para aktor sektor keamanan dibenahi atau dibangun kembali, isu gender menjadi menjadi pusat perhatian sejak awal proses pembenahan dan bukan sekadar tambahan ketika pembenahan memasuki proses konsolidasi.
- Identifikasi segala struktur informal dan tradisional

yang memungkinkan wanita mempengaruhi para pembuat kebijakan dan/atau warga masyarakat. Apabila cocok, usahakan untuk memperkuat struktur tersebut.

- Lakukan kerja sama dengan struktur ekstralegal yang dapat menjamin suatu tingkat pengawasan atas penyediaan peradilan dalam konteks di mana lembaga-lembaga negara tidak mampu menyediakan layanan ini, khususnya dalam mendukung penanganan kasus kekerasan terhadap wanita.
- Lakukan penilaian gender atas proses RSK dan sebarakan temuan dan rekomendasi secara luas melalui media dan di kalangan pejabat pemerintah dan lembaga donor yang dijadikan sasaran.

5.2 Negara-negara transisi dan negara-negara berkembang

Negara-negara dalam masa transisi dan negara-negara berkembang mencakup berbagai konteks yang berbeda secara signifikan dalam kemampuan sosio-ekonomi, teknik dan sumber daya manusianya.

Transisi menuju demokrasi merupakan proses jangka panjang dan belum tentu memberikan manfaat yang setara bagi semua warga masyarakat. Meskipun pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan cenderung meningkat, ketidaksetaraan dalam jangka pendek bisa menjadi lebih menonjol dan para wanita khususnya bisa menghadapi peningkatan ketidakamanan berupa GBV, perdagangan manusia atau eksploitasi di industri seks.⁴⁰

Di negara-negara berkembang maupun negara-negara dalam masa transisi, perusahaan-perusahaan keamanan swasta – pada dasarnya perusahaan non-pemerintah, walaupun diatur oleh perundang-undangan yang disahkan parlemen – menjadi aktor yang semakin penting dalam penyediaan layanan keamanan. Karena itu, perusahaan keamanan swasta ini harus diawasi oleh OMS.

Kotak 14 Kantor penghubung LSM – titik mula gender yang potensial⁴¹

Banyak pemerintahan di Eropa Timur dan Tengah dan Negara-negara Baltik telah mendirikan kantor penghubung LSM dengan model yang berbeda:

- Kroasia, Republik Ceko, Polandia, Slowakia, Slovenia: Fungsi kantor tersebut dijalankan oleh sebuah satuan birokrasi dan badan penasihat yang cukup representatif, yang bekerja dengan kemitraan sebagaimana ditentukan undang-undang, dekret atau piagam.
- Hongaria, Rumania: Badan-badan pemerintah mengawasi kerja sama LSM-pemerintah tanpa badan penasihat.
- Estonia, Latvia: Departemen-departemen yang ada menangani fungsi penghubungan LSM-pemerintah di samping tanggung jawab mereka yang lain, termasuk pemerintah lokal dan administrasi regional.
- Lituania: Berbagai departemen pemerintah bertanggung jawab berkoordinasi dengan LSM dalam wilayah kewenangannya.

Landasan pemikiran utama kantor penghubung LSM di negara-negara tersebut di atas adalah peningkatan hubungan antara masyarakat sipil dan pemerintah. Kantor penghubung LSM tidak didirikan khusus untuk tujuan menangani sektor keamanan atau isu gender. Namun demikian, kantor penghubung tersebut merupakan titik mula penting bagi OMS untuk menyampaikan suara dalam hal ini dan dapat digunakan untuk mengadvokasikan dengan para pejabat pemerintah lokal menangani isu gender dalam kebijakan dan praktik sektor keamanan. Pengembangan mekanisme yang ada, seperti kantor penghubung ini, merupakan aspek penting dari pengembangan kemampuan untuk memadukan gender ke dalam pengawasan masyarakat sipil atas sektor keamanan karena pembentukan badan baru dapat menghabiskan waktu dan memerlukan banyak sumber daya.

Sebagian negara dalam masa transisi mungkin memiliki banyak orang berpendidikan tinggi untuk menduduki berbagai jabatan di angkatan bersenjata, kepolisian dan lembaga negara. Namun demikian, lembaga-lembaga ini mungkin kekurangan pertanggungjawaban yang demokratis dan struktur serta prosedur tata pemerintahan yang transparan. Secara politik, tantangan bagi pengawasan masyarakat sipil atas sektor keamanan meliputi warisan dari rezim yang otoriter, penentangan birokrasi yang kuat terhadap perubahan, dan hubungan yang sering tegang di antara lembaga-lembaga negara dan OMS. Keadaan ini berdampak langsung terhadap kemampuan OMS untuk mengawasi para aktor sektor keamanan dan kemungkinan dialog antara masyarakat sipil dan lembaga-lembaga negara mengenai masalah keamanan bersama.

Khususnya di negara-negara berkembang, dan juga di banyak negara dalam masa transisi dan negara pasca-konflik, pembangunan kemampuan OMS masih menjadi tantangan utama. Seperti yang terlihat setelah beberapa puluh tahun bantuan pembangunan di Afrika, kurangnya keahlian milik lokal yang berkelanjutan tetap menjadi masalah dan menjadi salah satu alasan mengapa tujuan pembangunan tidak tercapai. Intervensi RSK yang diprakarsai lembaga donor mungkin ditentang dibandingkan dengan proses RSK yang diprakarsai masyarakat lokal. Negara-negara dalam masa transisi mungkin juga menentang desakan pembenahan dari luar negeri, walaupun kemungkinan keanggotaan EU dan NATO akan menjadi pendorong signifikan untuk melakukan pembenahan bagi sebagian negara. Dalam kedua jenis negara tersebut, angkatan bersenjata mungkin memiliki kekuatan yang berlebihan, setelah mendapatkan peran utama sebagai pemelihara keamanan dalam negeri. Hal ini mungkin menimbulkan konsekuensi keamanan yang berbeda bagi pria dan wanita, dan juga bagi kemungkinan pembangunan sosio-ekonomi yang berkelanjutan.

Sebagaimana dalam konteks pasca-konflik, para aktor bukan negara di banyak negara berkembang bisa menjadi penyedia utama keamanan dan keadilan dan berhubungan dengan sistem negara formal. Aktor bukan negara ini bisa meliputi pengadilan tradisional, layanan ekstralegal dan satuan pertahanan lokal. OMS yang bekerja pada tingkat lokal dapat memainkan peran penting dalam mengawasi tindakan para aktor bukan negara ini dan mengadvokasi cara-cara memasukkan mereka dalam proses RSK dan juga dalam program bantuan internasional. Pada khususnya, harus ada suatu penekanan pada bagaimana mengelola kewenangan, bagaimana menyediakan layanan dan legitimasi apa yang dimiliki mereka di mata para pria dan wanita sebagai mekanisme penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Hal ini menjadi kian penting karena banyak negara berkembang tidak dapat menanggung biaya personel hukum yang mahal seperti pengacara yang berpendidikan profesional. Selain itu, kehadiran polisi mungkin terbatas di sebagian daerah karena sumber daya yang terbatas atau karena tingkat ketidakamanan yang tinggi.

! Peluang dan kiat memadukan isu gender

- Kalau belum ada, advokasi ruang untuk berhubungan dengan lembaga-lembaga negara untuk menyuarakan ketidakamanan masyarakat – seperti kantor penghubung LSM (lihat Kotak 14). Pastikan agar isu gender disoroti dan organisasi wanita juga dilibatkan dalam pekerjaan kantor penghubung LSM.
- Para aktor eksternal hendaknya mendukung pembangunan kemampuan OMS, termasuk organisasi wanita, daripada hanya pembangunan lembaga sektor keamanan.
- Sebaiknya OMS menilai sampai sejauh mana para aktor bukan negara seperti kepala suku dan agen keamanan swasta menyediakan keamanan dan

Kotak 15 | RSK di Afrika Selatan – pengarusutamaan gender dalam transisi dari apartheid menuju demokrasi⁴²

Kasus transisi Afrika Selatan memberikan contoh bagaimana lingkungan politik yang kondusif dan networking/pengorganisasian di kalangan wanita di seluruh spektrum politik dan di dalam pasukan keamanan sendiri menghasilkan proses transformasi keamanan yang menyeluruh dan inklusif. Pelajaran penting yang diperoleh dari proses ini, yang semuanya berdampak langsung terhadap pembuatan kebijakan meliputi:

1. Afrika Selatan melampaui pembenahan untuk mengubah sektor keamanan dengan mengambil langkah-langkah untuk berkonsultasi dengan masyarakat mengenai peran sektor keamanan dan menempatkan keamanan dan pembangunan manusia sebagai inti dari kerangka keamanan nasionalnya.
2. Para wanita dengan pandangan dan nilai-nilai yang berbeda dan dari semua ras sangat penting dalam menyatakan visi dan mempengaruhi proses di mana keamanan masyarakat menjadi prioritas negara.
3. Para wanita dari seluruh spektrum politik dikerahkan untuk mencapai keterwakilan 50% dalam negosiasi menjelang pemilihan umum 1994 dan 28% kursi parlemen. Mereka terus mendorong partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan dan tetap menjadi pendukung utama keamanan manusia.
4. Di lembaga keamanan semakin diakui bahwa wanita:
 - a. Memberikan perspektif penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
 - b. Memberikan pengaruh positif sebagai anggota pasukan keamanan.
 - c. Sangat penting dalam membangun perdamaian dan keamanan.
5. Transformasi sektor keamanan tidak akan sempurna apabila budaya institusinya tidak berubah. Penanggulangan diskriminasi berbasis gender, sebagaimana diskriminasi rasial, merupakan indikator utama transformasi.

keadilan, legitimasi mereka dalam menyediakan keamanan dan keadilan ini, dan mutu layanan yang disediakan. Informasi harus dikumpulkan menggunakan metode yang peka terhadap gender.

- Apabila cocok dan diperlukan, promosikan perampingan angkatan bersenjata dan perkenalkan pokok-pokok pikiran mengenai gender yang dapat memperluas perdebatan mengenai keamanan dalam proses tersebut.

5.3 Negara-negara maju

Di negara-negara maju dengan pemerintahan yang demokratis juga terdapat kesempatan yang signifikan bagi OMS untuk memainkan peran pengawasan, terutama sehubungan dengan isu gender. Ini dapat dilakukan dengan ikut serta dalam perdebatan mengenai apa yang harus dimasukkan di bawah bendera keamanan nasional; bagaimana keamanan dan keadilan diberikan kepada para pria dan wanita; dan meningkatkan kesetaraan antara pria dan wanita di lembaga-lembaga sektor keamanan. Dalam sebagian kasus, mungkin dapat ditekankan apa implikasi dari pengeluaran militer yang berlebihan terhadap sektor-sektor lain seperti kesehatan dan pendidikan yang sangat penting bagi keamanan manusia.

Mendesak pemaduan gender ke dalam strategi restrukturisasi pasukan keamanan atau pembenahan institusi tidak hanya berpotensi menjamin kesetaraan antara pria dan wanita dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan. Desakan ini dapat memperluas secara fundamental perdebatan mengenai apa itu keamanan nasional dan dengan demikian memasukkan suara-suara di luar pemerintahan dan/atau Dewan Keamanan Nasional. Kasus penyusunan Buku Putih Pertahanan Afrika Selatan dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan keamanan memberikan contoh yang layak diikuti dalam hal ini, di mana wakil-wakil OMS berpartisipasi sebagai mitra penting, baik sebagai pakar pertahanan maupun pakar gender.

Lihat Tool (Tool) mengenai Pembuatan Kebijakan Keamanan Nasional dan Gender

Tergantung pada atas nama siapa mereka diberi mandat untuk berbicara, OMS sangat mampu mempengaruhi perdebatan keamanan nasional dengan kenyataan kehidupan sehari-hari rakyat dan dengan demikian merupakan saluran penting bagi para pembuat keputusan. OMS bisa juga berperan sebagai saluran bagi suara para wanita yang terlalu sering terpinggirkan dari perdebatan kebijakan sektor keamanan formal. Akhirnya, perlu dikemukakan bahwa lembaga-lembaga donor negara-negara maju berada di garis depan dalam menawarkan dan memberikan nasihat dan keahlian teknis kepada negara-negara yang sedang menjalani proses RSK.

OMS memiliki peran dan tanggung jawab utama dalam menjamin agar aspek-aspek yang berkaitan dengan gender dari pengawasan masyarakat sipil dimasukkan dalam program mereka. OMS internasional juga berperan dalam memberikan bantuan dalam pembangunan pengawasan sektor keamanan dan masukan bagi agenda lembaga donor yang berkaitan dengan RSK.

! Peluang dan kiat pemaduan isu gender

- Advokasi perdebatan yang diperluas mengenai apa itu 'keamanan nasional', khususnya pemaduan GBV.
- Waspada dan bersiap untuk bertindak apabila kebijakan – termasuk kebijakan keamanan nasional – didefinisikan kembali dan diperdebatkan secara terbuka.
- Pantau dan jalin hubungan dengan lembaga-lembaga donor untuk menjamin agar dukungan mereka terhadap RSK tanggap terhadap gender dan meliputi penekanan pada pengawasan masyarakat sipil.
- Berikan pembangunan kemampuan dan dukungan lainnya kepada OMS, termasuk organisasi wanita, dalam konteks negara lain yang ingin membangun kemampuan mereka mengawasi sektor keamanan.
- Gunakan mekanisme yang ada untuk meminta informasi dari sektor keamanan untuk mencapai pengawasan yang efektif.

6 Rekomendasi pokok

Untuk lembaga donor, organisasi internasional dan regional:

1. Dukung pembentukan badan pemantauan sektor keamanan partisipatif: Bila mendukung RSK, perlu dipastikan pelibatan organisasi masyarakat sipil, seperti organisasi wanita, di badan pengawasan sektor keamanan. Pastikan agar pemilihan lokal dan mekanisme partisipatif mendukung kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan RSK.
2. Dukung pelatihan mengenai isu gender dan sektor keamanan bagi OMS: Pelatihan mengenai isu gender maupun sektor keamanan merupakan cara penting membentuk basis keahlian yang diperlukan di dalam OMS, yang memungkinkan mereka terlibat lebih aktif dalam pengawasan sektor keamanan dan meningkatkan inklusivitas serta legitimasi kegiatan ini. Juga pastikan agar staf lembaga donor dan para pembuat keputusan lainnya yang menyusun kebijakan yang berkaitan dengan keamanan mendapat pelatihan gender.

Untuk organisasi masyarakat sipil:

3. Jadilah pakar sektor keamanan: Pastikan agar Anda memahami kebutuhan dan prioritas keamanan lokal, nasional dan regional berbagai kelompok pria, wanita, anak perempuan dan anak lelaki. Kembangkan keahlian Anda dalam kebijakan, struktur dan program sektor keamanan nasional, termasuk bahasa yang digunakan di kalangan aktor keamanan.
4. Bergabung atau lakukan kerja sama dengan badan pemantauan sektor keamanan lokal, nasional atau regional: OMS, termasuk organisasi wanita, dapat mengajukan diri untuk berpartisipasi dalam badan pemantauan sektor keamanan dan dapat membantu memasukkan isu gender ke dalam agenda.
5. Lakukan kerja sama dengan organisasi wanita: OMS dapat memperkuat pengawasan yang tanggap terhadap gender atas sektor keamanan melalui kemitraan dengan organisasi wanita lokal, nasional dan internasional.
6. Advokasi kebijakan dan program keamanan yang tanggap terhadap gender: OMS dapat memainkan peran aktif – melalui kampanye advokasi atau lobi – dalam menuntut kebijakan dan praktik yang meningkatkan partisipasi wanita dalam semua pangkat dan jabatan; memperkuat pengarusutamaan gender dan mengurangi kekerasan berbasis gender.
7. Tingkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu

gender dan sektor keamanan: Kampanye kesadaran masyarakat, termasuk bekerja sama dengan media, dapat berfokus pada topik-topik seperti pemberantasan stereotipe gender dan mendorong perekrutan personel sektor keamanan perempuan; akses peradilan; atau mekanisme pelaporan GBV kepada polisi.

8. Lakukan audit gender atas organisasi sektor keamanan atau proses RSK: OMS dapat meminta lembaga-lembaga sektor keamanan bertanggung jawab atas pemaduan isu gender dengan melakukan audit atau penilaian.
9. Dokumentasikan kekerasan terhadap wanita, pria, anak lelaki dan anak perempuan: OMS dapat memainkan peran penting dalam pengawasan sektor keamanan melalui penelitian mengenai kekerasan berbasis gender dan dokumentasi GBV oleh personel sektor keamanan, yang kemudian dapat digunakan untuk kegiatan peningkatan kesadaran dan advokasi.
10. Pantau anggaran keamanan dan pertahanan: Pelaksanaan analisis anggaran gender atas anggaran reformasi keamanan dan pertahanan, pengeluaran dan pengadaan pada tingkat nasional atau institusi dapat memperkuat transparansi dan pertanggungjawaban.
11. Buat jaringan OMS: Kerja sama formal dengan OMS lain, termasuk organisasi wanita, dapat menciptakan suatu program bersama mengenai isu-isu pengawasan sektor keamanan dan memperkuat prakarsa peningkatan kesadaran dan advokasi.
12. Bangun dan perkuat kerja sama antara OMS dan lembaga-lembaga sektor keamanan: Kumpulkan para wanita dan pria yang menunjukkan perhatian terhadap penanganan isu gender dari angkatan bersenjata, kepolisian dan lembaga sektor keamanan lainnya serta OMS. Buat agenda dan strategi bersama untuk menjamin pendekatan yang lebih efektif dalam memadukan isu gender. Berikan pelatihan gender kepada personel sektor keamanan.
13. Padukan isu gender: OMS dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam pengawasan yang tanggap terhadap gender dan menciptakan tempat kerja yang non-diskriminatif dengan melaksanakan pelatihan gender internal, penerapan kebijakan atau kode perilaku mengenai pelecehan seksual, dan mengambil langkah-langkah untuk menjamin keseimbangan gender pegawai.

7 Sumber daya tambahan

Situs yang berguna

International Alert (Kewaspadaan Internasional) – <http://www.international-alert.org>

Topic Guide: Civil Society and Security (Panduan Topik: Masyarakat Sipil dan Keamanan), Global Facilitation Network for Security Sector Reform (Jaringan Fasilitasi Global untuk Reformasi Sektor Keamanan) – http://www.ssrnetwork.net/topic_guides/civil_soci.php

UNIFEM Portal on Women, Peace and Security (Portal UNIFEM mengenai Wanita, Perdamaian dan Keamanan) – <http://www.womenwarpeace.org>

WILPF PeaceWomen – <http://www.peacewomen.org>

Panduan praktis dan buku pedoman

Amnesty International (Amnesti Internasional), *Monitoring and Reporting Human Rights Abuses in Africa: A Handbook for Community Activists (Pemantauan dan Pelaporan Pelanggaran HAM di Afrika: Buku Pedoman bagi Aktivistis Masyarakat) (Amnesty International [Amnesti Internasional]. Amsterdam)*, 2002.

http://www.protectionline.org/IMG/pdf/spa_handbook.pdf

Amnesty International (Amnesti Internasional), *Understanding Policing: A Resource for Human Rights Activists (Memahami Perpolisian: Sumber Daya bagi Aktivistis HAM) (Amnesty International: Amsterdam)*, 2006.

http://www.amnesty.nl/bibliotheek_vervolg/police_and_human_rights#artikel11338

Bauer, J dan Hélie, A., *Documenting Women's Rights Violations by Non-State Actors: Activist Strategies from Muslim Communities (Dokumentasi Pelanggaran HAM Wanita oleh para Aktor Bukan Negara: Strategi Aktivistis dari Masyarakat Muslim)* (Rights & Democracy and Women Living under Muslim Laws [HAM & Democracy dan Wanita yang Hidup dalam Hukum Islam]: Montréal dan London), 2006.

http://www.peacewomen.org/resources/Human_Rights/nonstateactors_violations.pdf

Caparini, Cole dan Kinzelbach, penyunting, *Public Oversight of the Security Sector: A Handbook for CSOs on Democratic Security Governance (Pengawasan Masyarakat atas Sektor Keamanan: Buku Pedoman bagi OMS mengenai Tata Pemerintahan Keamanan Demokratis)* (Renasans: Bratislava), akan terbit Juli 2008.

International Alert and Women Waging Peace (Kewaspadaan Internasional dan Wanita Pejuang Perdamaian), *Inclusive Security, Sustainable Peace: A Toolkit for Advocacy and Action (Keamanan Inklusif, Perdamaian Berkelanjutan: Toolkit Advokasi dan Tindakan)* (International Alert: London), 2004.

http://www.international-alert.org/our_work/themes/gender_5.php

Organisation for Economic Co-Operation and Development (Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan) – Development Assistance Committee (Komite Bantuan Pembangunan), *OECD DAC Handbook on Security System Reform: Supporting Security and Justice (Buku Pedoman OECD DAC mengenai Reformasi Sistem Keamanan: Mendukung Keamanan dan Keadilan)* (OECD: Paris), 2007.

<https://www.oecd.org/dataoecd/43/25/38406485.pdf>

UN Department of Peacekeeping Operations (Departemen Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB), *Gender Resource Package for Peacekeeping Operations (Paket Sumber Daya Gender untuk Operasi Pemeliharaan Perdamaian)* (UN DPKO: New York), 2004.

<http://pbpu.unlb.org/pbpu/genderpack.aspx>

Valasek, K. bersama Nelson, K., *Securing Equality, Engendering Peace: A Guide to Policy and Planning on Women, Peace and Security (Mencapai Kesetaraan, Mewujudkan Perdamaian: Panduan Kebijakan dan Perencanaan mengenai Wanita, Perdamaian dan Keamanan)* (INSTRAW: Santo Domingo), 2006.

<http://www.un-instraw.org/en/docs/1325/1325-Guide-ENG.pdf>

Artikel dan laporan online

Anderlini, S.N., *'Negotiating the Transition to Democracy and Reforming the Security Sector: The Vital contributions of South African Women' ('Perundingan Transisi menuju Demokrasi dan Reformasi Sektor Keamanan: Sumbangan penting Wanita Afrika Selatan')* (Hunt Alternatives Fund [Dana Alternatif Hunt]: Washington DC), 2004.

http://www.huntalternatives.org/download/9_negotiating_the_transition_to_democracy_and_reforming_the_security_sector_the_vital_contributions_of_south_african_women.pdf

Ball, N., *'Civil Society, Good Governance and the Security Sector' ('Masyarakat Sipil, Tata Pemerintahan yang Baik dan Sektor Keamanan')*, *Civil Society and the Security Sector, Concepts and Practices in New Democracies (Masyarakat Sipil dan Sektor Keamanan, Konsep dan Praktik di Negara-negara Demokrasi Baru)*, penyunting Caparini, M., Fluri, P. dan Molnar, F. (DCAF: Jenewa), 2006.

<http://se2.isn.ch/serviceengine/FileContent?serviceID>

=21&fileid=3744D03E-599F-815E-8316-872CD10E1ECF&Ing=en

Caparini, M., *Civil Society and Democratic Oversight of the Security Sector: A Preliminary Investigation (Masyarakat Sipil dan Pengawasan Demokratis atas Sektor Keamanan: Penyelidikan Permulaan)*, Makalah Kerja No. 132 (DCAF: Jenewa), 2004.
http://www.dcaf.ch/civsoc/proj_governance.pdf

Caparini, M., Fluri, P. dan Molnar, F. penyunting, *Civil Society and the Security Sector, Concepts and Practices in New Democracies (Masyarakat Sipil dan Sektor Keamanan, Konsep dan Praktik di Negara-negara Demokrasi Baru)* (DCAF: Jenewa), 2006. http://www.dcaf.ch/publications/e-publications/CivSoc/bm_caparini_civsoc.cfm

Nathan, L., *Local Ownership of Security Sector Reform: A Guide for Donors (Pemilikan Lokal Reformasi Sektor Keamanan: Panduan bagi Lembaga-lembaga Donor)*, (Crisis States Research Centre [Pusat Penelitian Negara-negara yang dalam masa Krisis]: London), 2007.
<http://www.crisisstates.com/download/others/SSRRef ormNathan2007.pdf>

Valasek, K., 'Gender and Democratic Security Governance' ('Gender dan Tata Pemerintahan Keamanan yang Demokratis'), *Public Oversight of the Security Sector: A Handbook for CSOs on Democratic Security Governance (Pengawasan Masyarakat atas Sektor Keamanan: Buku Panduan bagi OMS mengenai Tata Pemerintahan Keamanan Demokratis)*, penyunting Caparini, Cole dan Kinzelbach, (Renesans: Bratislava), akan terbit Juli 2008.

Nicolien Wassenaar, *Incorporating gender into your NGO (Memadukan gender ke dalam LSM Anda)*. Networklearning.org, 2003.
<http://www.networklearning.org/download/gender.pdf>

CATATAN AKHIR

- 1 Ball, N., 'Civil Society, Good Governance and the Security Sector' (Masyarakat Sipil, Tata Pemerintahan yang Baik dan Sektor Keamanan'), Civil Society and the Security Sector, Concepts and Practices in New Democracies (Masyarakat Sipil dan Sektor Keamanan, Konsep dan Praktik di Negara-negara Demokrasi Baru), penyunting Caparini, M., Fluri, P, dan Molnar F. (DCAF: Jenewa), 2006.
- 2 Disadur dari Jones, S. dan Williams, G., 'A Common Language for Managing Official Development Assistance: A Glossary of ODA Terms' ('Bahasa Umum untuk Pengelolaan Bantuan Pembangunan Resmi: Glosarium Istilah ODA') (Oxford Policy Management [Manajemen Kebijakan Oxford]: Oxford), 2002.
- 3 Marina Caparini, Civil Society and Democratic Oversight of the Security Sector: A Preliminary Investigation (Masyarakat Sipil dan Pengawasan Demokratis atas Sektor Keamanan: Penyelidikan Permulaan), Makalah kerja No. 132 (Jenewa: DCAF, 2004) h.7-8
- 4 Caparini, Cole dan Kinzelbach, Public Oversight of the Security Sector: A Handbook for CSOs on Democratic Security Governance (Pengawasan Masyarakat atas Sektor Keamanan: Buku Pedoman bagi OMS mengenai Tata Pemerintahan Keamanan yang Demokratis) (Renesans: Bratislava), akan terbit.
- 5 OECD, OECD DAC Handbook on Security System Reform, Supporting Security and Justice (Buku Pedoman OECD DAC mengenai Reformasi Sektor Keamanan, Mendukung Keamanan dan Peradilan), (OECD: Paris), 2007 h.20-21. Juga: Hänggi, H., 'Making Sense of Security Sector Governance' ('Memahami Tata Pemerintahan Sektor Keamanan'), Challenges of Security Sector Governance, (Tantangan Tata Pemerintahan Sektor Keamanan), penyunting Hänggi, H. dan Winkler, T.H. (DCAF: Jenewa), 2003.
- 6 Nathan, L., 'Local Ownership of Security Sector Reform: A Guide for Donors' ('Pemilikan Lokal Reformasi Sektor Keamanan: Panduan bagi Lembaga-lembaga Donor'), makalah yang dikomisikan Security Sector Reform Strategy of the UK Government's Conflict Prevention Pool (Strategi Reformasi Sektor Keamanan Kelompok Pencegahan Konflik Pemerintah Inggris) (Crisis States Research Centre [Pusat Penelitian Negara-negara yang dalam masa Krisis]: London), 2007.
- 7 UN Economic and Social Council (Dewan Ekonomi dan Sosial PBB), Report of the Secretary-General (Laporan Sekretaris Jenderal), Coordination of the Policies and Activities of the Specialized Agencies and Other Bodies of the United Nations System: Mainstreaming the Gender Perspective into all Policies and Programmes in the United Nations System (Koordinasi Kebijakan dan Kegiatan Badan-badan Khusus dan Badan-badan Lain dalam Sistem PBB: Pengarusutamaan Perspektif Gender ke dalam semua Kebijakan dan Program dalam Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa), 12 Juni 1997.
- 8 OECD, h.224.
- 9 Nathan, h.6.
- 10 OECD; DFID (Departemen Pembangunan Internasional Inggris), Understanding and Supporting Security Sector Reform (Memahami dan Mendukung Reformasi Sektor Keamanan) (DFID, tanpa tanggal: London).
- 11 Untuk analisis terperinci mengenai pemilikan lokal RSK, lihat Nathan.
- 12 Farr, V., 'Voices from the Margins: A Response to "Security Sector Reform in Developing and Transitional Countries' ('Suara-suara dari Kelompok Terpinggirkan: Respons terhadap "Reformasi Sektor Keamanan di Negara-negara Berkembang dan Negara-negara Transisi"), Security Sector Reform: Potentials and Challenges for Conflict Transformation (Reformasi Sektor Keamanan: Potensi dan Tantangan terhadap Transformasi Konflik), Berghof Handbook Dialogue Series (Seri Dialog Buku Pedoman Berghof), no. 2, penyunting McCartney, C., Fischer, M. dan Wils, O. (Berghof Research Centre for Constructive Conflict Management [Pusat Penelitian Berghof untuk Manajemen Konflik Konstruktif]: Berlin), 2004.
- 13 Caparini, h.58.
- 14 'Fem'LINKpacific: Media Initiatives for Women' ('Fem'LINKpacific: Prakarsa Media untuk Wanita'), femTALKE'News. 11/2003. <http://www.peacewomen.org/news/Fiji/Nov03/femTALKenews.html>.
- 15 Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan LICADHO lihat <http://www.licadho.org/reports.php#r-112>.
- 16 Dikutip dari "Gender Checklist for Liberia" ("Daftar Periksa Gender untuk Liberia") <http://www.peacewomen.org/resources/1325/LiberiaGenderChecklist.html>.
- 17 Untuk informasi lebih lanjut mengenai penyusunan indikator yang sensitive terhadap gender: Moser, A., 'Gender and Indicators: Overview Report' ('Gender dan Indikator: Laporan Tinjauan') (BRIDGE/IDS: Sussex), 2007. <http://www.bridge.ids.ac.uk/reports/IndicatorsORfinal.pdf>.
- 18 Disadur dari: 'Framework for the integration of women in APEC' ('Kerangka pemaduan wanita dalam APEC'). http://www.gender.go.jp/english/apec/frame_work/b.html
- 19 Moser, C., 'An Introduction to Gender Audit Methodology: Its design and implementation in DFID Malawi' ('Pengantar Metodologi Audit Gender: Rancangan dan pelaksanaannya di DFID [Departemen Pembangunan Internasional Inggris] Malawi') (Overseas Development Institute [Institut Pembangunan Luar Negeri]: London), 2005.
- 20 Hofbauer Balmori, H., Gender and Budgets: Overview Report (Gender dan Anggaran: Laporan Tinjauan), BRIDGE Cutting Edge Pack (Institute of Development Studies [Institut Kajian Pembangunan]: Brighton), 2003, h.17-20.
- 21 Dikutip dari: 'The White Ribbon Campaign' ('Kampanye Pita Putih'). http://www.whiteribbon.ca/about_us/.
- 22 Disadur dari: Until The Violence Stops (Sampai Kekerasan Berhenti) (UTVS), Toolkit Advokasi, 18-19 April 2005, h.12-13. <http://www.vdayeurope.org/newsletters/advocacydoc.pdf>.
- 23 'Participation and Access of Women to the Media and their Impact on and Use as an Instrument for the Advancement and Empowerment of Women' ('Partisipasi dan Akses Wanita atas Media dan Dampaknya terhadap dan Penggunaan sebagai Instrumen untuk Memajukan dan Memberdayakan Wanita'), Diskusi Online (Division for the Advancement of Women [Divisi untuk Kemajuan Wanita]: New York), 2002. <http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/media2002/online.html>.
- 24 Williams, T., 'Gender for Journalists' ('Gender untuk Wartawan'), Online Training Toolkit Pelatihan Online). http://www.cpu.org.uk/cputoolkits/gender_reporting/ge

- nder_tools_sensitive_language.html.
- ²⁵ Dikutip dari: Albrecht, P., 'Advocacy' ('Advokasi'), Public Oversight of the Security Sector: A Handbook for CSOs on Democratic Security Governance (Pengawasan Masyarakat atas Sektor Keamanan: Buku Pedoman bagi OMS mengenai Tata Pemerintahan Keamanan yang Demokratis), penyunting Caparini, M., Cole dan Kinzelbach (Renesans: Bratislava), akan terbit Juli 2008.
- ²⁶ Dikutip dari: Valasek, K., h. 13, 'Gender and Democratic Security Governance' ('Gender dan Tata Pemerintahan Keamanan yang Demokratis'), dalam Caparini, Cole, Kinzelbach, Public Oversight of the Security Sector: A Handbook for CSOs on Democratic Security Governance (Pengawasan Masyarakat atas Sektor Keamanan: Buku Pedoman bagi OMS mengenai Tata Pemerintahan Keamanan yang Demokratis) (Renesans: Bratislava), akan terbit Juli 2008.
- ²⁷ Valasek.
- ²⁸ Anggota GAPS meliputi: International Alert (Kewaspadaan Internasional); Womankind Worldwide (Kaum Wanita di Seluruh Dunia); UNIFEM UK; UNA-UK; Women's International League for Peace and Freedom (Liga Internasional Wanita untuk Perdamaian dan Kebebasan); the International Rescue Committee (Komite Penyelamatan Internasional); Serene Communications Limited; Widows for Peace through Democracy (Janda untuk Perdamaian melalui Demokrasi); Northern Ireland Women's European Platform (Platform Eropa Wanita Irlandia Utara); Shevolution, Eyecatcher Associates dan Project Parity (Proyek Keseimbangan); dan beberapa konsultan independent yang berfokus pada isu-isu terkait.
- ²⁹ OSCE ODIHR, UN-INSTRAW dan DCAF, "How to make gender training for security personnel more effective: Top 10 conclusions of an expert-group discussion" ("Bagaimana membuat pelatihan gender bagi personel keamanan menjadi lebih efektif: 10 kesimpulan pokok dari diskusi kelompok pakar").
http://www.uninstraw.org/en/docs/SSR/GenderTraining_Ediscussion_Top10Recommendations_250607.pdf
- ³⁰ Disadur dari 'What the Union of the Committees of Soldiers Mothers of Russia (name before 1998: the Committee of Soldiers Mothers of Russia) did for the first time in Russia'. ('Apa yang pertama kali dilakukan Serikat Komite para Ibu Prajurit Rusia [nama sebelum tahun 1998: Komite para Ibu Prajurit Rusia] di Rusia')
<http://www.ucsmr.ru/english/ucsmr/history.htm>.
- ³¹ 'Building a New Iraq: Women's Role in Reconstruction' ('Membangun Irak Baru: Peran Wanita dalam Rekonstruksi'), (Woodrow Wilson Centre [Pusat Penelitian Woodrow Wilson]/Women Waging Peace [Wanita Pejuang Perdamaian]), 2003.
http://www.huntalternatives.org/download/20_building_a_new_iraq_women_s_role_in_reconstruction.pdf.
- ³² Women in Peacebuilding Programme (Program Wanita dalam Pembangunan Perdamaian).
<http://www.wanep.org/programs/wipnet.html>.
- ³³ Valasek, K., 'Gender and Democratic Security Governance' ('Gender dan Tata Pemerintahan Keamanan yang Demokratis'), Public Oversight of the Security Sector: A Handbook for CSOs on Democratic Security Governance (Pengawasan Masyarakat atas Sektor Keamanan: Buku Pedoman bagi OMS mengenai Tata Pemerintahan Keamanan yang Demokratis), penyunting Caparini, M., Cole dan Kinzelbach (Renesans: Bratislava), akan terbit Juli 2008).
- ³⁴ Barnes, K., An assessment of Response Mechanisms to Sexual Exploitation and Abuse in Bo and Kenema (Penilaian mengenai Mekanisme Respons terhadap Eksploitasi dan Pengerusakan Seksual di Bo dan Kenema) (UNICEF-Sierra Leone), laporan yang tidak diterbitkan (2005).
- ³⁵ Conaway, C.P. dan Sen, A., Beyond Conflict Prevention: How Women Prevent Violence and Build Sustainable Peace (Melampaui Pencegahan Konflik: Bagaimana Wanita Mencegah Kekerasan dan Membangun Perdamaian yang Berkelanjutan) (Global Action to Prevent War [Tindakan Global untuk Mencegah Perang]/WILPF), 2005, h.41-42.
- ³⁶ Banyak tersedia alat yang memberikan panduan mengenai bagaimana memulai pengarusutamaan gender di dalam organisasi. Misalnya, lihat Wassenaar, N., Incorporating Gender into your NGO (Memadukan Gender ke dalam LSM Anda), Networklearning.org, 2006.
<http://www.networklearning.org/download/gender.pdf>.
- ³⁷ Oxfam, 'Oxfam's Policy on Gender Equality' ('Kebijakan Oxfam mengenai Kesetaraan Gender'), 2003.
http://www.oxfam.org.nz/imgs/whatwedo/gender/gender_policy2003.pdf.
- ³⁸ Untuk informasi lebih lanjut: International Crisis Group (Kelompok Krisis Internasional), Liberia: Resurrecting the Justice System (Menghidupkan Kembali Sistem Peradilan), Africa Report (Laporan Afrika) no.107, 6 April 2006, terutama h. 13-16.
<http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4061>.
- ³⁹ Barth, E.F., Peace as Disappointment: The Reintegration of Female Soldiers in Post-Conflict Societies: A Comparative Study from Africa (Perdamaian sebagai Kekecewaan: Reintegrasi Prajurit Perempuan dalam Masyarakat Pasca-Konflik: Studi Komparatif dari Afrika), (International Peace Research Institute Norway [Institut Penelitian Perdamaian Internasional Norwegia]: PRIO), 2002.
<http://www.peacewomen.org/resources/DDR/AfricaBarth.html>.
- ⁴⁰ Vlachova, M. dan Bason, L., 'Violence Against Women as a Challenge For Security Sector Governance' ('Kekerasan terhadap Wanita sebagai Tantangan terhadap Tata Pemerintahan Sektor Keamanan'), Challenges of Security Sector Governance (Tantangan Tata Pemerintahan Sektor Keamanan), penyunting Hanggi, H. dan Winkler, T.H., (DCAF: Munster), 2003, h. 6.
- ⁴¹ Gerasimova, M., 'The Liaison Office as a Tool for Successful NGO-Government Cooperation: An Overview of the Central and Eastern European and Baltic Countries' Experiences' ('Kantor Penghubung sebagai Alat untuk Mencapai Keberhasilan Kerja Sama LSM-Pemerintah: Tinjauan Pengalaman Negara-negara Eropa Tengah dan Timur serta Negara-negara Baltik'), The International Journal of Not-for-profit Law (Jurnal Internasional Undang-undang Non-komersial), jilid 7, Edisi 3, (2005).
http://www.icnl.org/knowledge/ijnl/vol7iss3/special_1.htm.
- ⁴² Anderlini, S.N., Negotiating the Transition to Democracy and Reforming the Security Sector: The Vital contributions of South African Women (Perundingan Transisi menuju Demokrasi dan Reformasi Sektor Keamanan: Sumbangan penting Wanita Afrika Selatan), (Hunt Alternatives Fund [Dana Alternatif Hunt]: Washington DC), 2004.

